idea
Ide dan Analitika Indonesia

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TAHUN 2022-2024



Source: DKP, KP


Source: Dispertap


Source: Kapanewon Panjatan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

PENGANTAR iii

BAB I. Rencana Strategis IDEA 2022-2027 1

Struktur Organisasi 15

Wilayah Kerja 16

Program yang Dikelola 17

Kegiatan Utama 18

IDEA Dalam Angka 19

BAB II. PROGRAM IDEA 21

Agenda Prioritas 1 21

- Memastikan Hak atas Kesehatan: Vaksinasi Covid 19 Inklusif bagi kelompok rentan 22
- Dari Kemiskinan Ekstrem Menuju Kesejahteraan Sosial 24

Agenda Prioritas 2 30

- Memperkuat Solusi Lokal untuk Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa: Bergerak dan Menyebarkan Cerita yang Berdampak 30
- Advokasi Anggaran Warga untuk Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang Inklusif 33
- Pelibatan Komunitas Dalam Transisi Energi Berkeadilan Melalui Implementasi EITI di Indonesia 35

Agenda Prioritas 3 41

- Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk mendukung Desa Mandiri Budaya 41
- Menuju SP4N LAPOR! yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 43
- Monitoring dan evaluasi SP4N LAPOR, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 46

Agenda Prioritas 4 48

- Mencetak Pemilih Muda Berintegritas di Indonesia 48

BAB III. PENGELOLAAN PENGETAHUAN IDEA 54

Agenda Prioritas 6 54

- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 55
- Pengembangan Unit Usaha Analitika Indonesia Konsultan (AIK) 56
- Penguatan dan Pengembangan Jaringan 56

Agenda Prioritas 7 57

- Analisis dan Kajian 58
- IDEA dalam Media 66

BAB IV. TATA KELOLA KELEMBAGAAN IDEA 68

Agenda Prioritas 5 68

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 68
- Pengelolaan Program Magang (Internship Program) 69
- Kebijakan Kelembagaan IDEA 71
- kinerja Keuangan IDA 72



PENGANTAR

Perkumpulan IDEA yang sudah berusia 27 tahun sangat bersyukur karena sebagai organisasi masyarakat sipil masih terus mengupayakan gerakan sosial di tengah situasi penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Tahun 2022 adalah tahun kebangkitan pasca pandemi Covid 19 yang Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terutama kelompok rentan.

Selama tahun 2022-2024, IDEA mengupayakan pencapaian 7 agenda prioritas yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis IDEA Tahun 2022-2027. Agenda-agenda prioritas yang dilaksanakan berkontribusi terhadap upaya pemenuhan hak ekosob warga, diantaranya adalah program vaksinasi Covid 19 yang inklusif yang berkontribusi pada capaian agenda prioritas 1. Program ERAT juga berkontribusi pada agenda prioritas 1 dalam renstra IDEA, terutama pada isu perbaikan tata kelola pemerintahan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Program memperkuat Solusi Lokal untuk Akuntabilitas Dana Advokasi Anggaran Warga untuk Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang Inklusif serta pelibatan Komunitas Dalam Transisi Energi Berkeadilan Melalui Implementasi EITI di Indonesia di Kabupaten Morowali Utara berkontribusi terhadap agenda prioritas 2.

Agenda Prioritas 3 Membangun Warga Sebagai komunitas Cerdas yang memahami logika alokasi sumber daya publik, aktif



terlibat dalam penyusunan dan aktif mengakses informasi pelaksanaan alokasi sumber daya publik termasuk dengan menggunakan teknologi daring, dilakukan dengan melaksanakan program Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk mendukung Desa Mandiri Budaya dan Monitoring dan evaluasi SP4N LAPOR, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

Sementara itu, agenda Prioritas 4 Penguatan Demokrasi dalam Pemilu 2024, IDEA menjalan program Memperkuat integritas pemilih dan Ketahanan terhadap politik uang yang didukung oleh Kemitraan. IDEA juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengawasan Pemilu 2024,diantaranya adalah membangun kolaborasi kelembagaan untuk mendukung pengawasan Pemilu yang akuntabel. IDEA juga terlibat dalam gerakan aksi masyarakat sipil di titik nol Yogyakarta dan perlawanan melalui sosila media menolak revisi RUU Pilkada 2024 melalui gerakan "Peringatan Darurat".

Pada sisi yang lain, upaya penguatan tata kelola lembaga juga menjadi mandat dalam rencana strategis IDEA, yaitu agenda prioritas 5 Penguatan Tata Kelola Lembaga sebagai Perkumpulan yang solid dan Berkelanjutan. Pencapaian agenda prioritas 5 diupayakan dengan memastikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kelembagaan secara internal berjalan tepat waktu dan penegakan prosedur operasi baku yang sudah dimiliki IDEA, diantaranya adalah POB personalia, POB keuangan, POB konflik kepentingan, anti kecurangan (anti freud) dan pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual (PSEA).

Agenda pengelolaan pengetahuan yang dimiliki IDEA menjadi agenda Prioritas 7 yaitu Peningkatan layanan IDEA sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi. Divisi pengelolaan pengetahuan menjalankan agenda tersebut dengan memanfaatkan kanal sosial media dan pengelolaan sumber daya pengetahuan dengan pendokumentasian dan penyebaran informasi, produk pengetahuan dan sebagai knowledge hub.

Agenda prioritas 6 yaitu Penguatan Penggalangan Sumber daya masih belum dapat berjalan maksimal terutama untuk menggalang sumber daya secara mandiri. Meskipun demikian, IDEA memiliki program Analitika Indonesia Konsultan sebagai bagian untuk penggalangan sumber daya selain dukungan dari pihak lain.

Akhir kata, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak mitra IDEA yang telah mendukung upaya advokasi dan mendorong gerakan perubahan sosial untuk pemenuhan hak warga. Tentu saja laporan ini masih memerlukan masukan dan saran dari para pembaca, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran informasi yang memadai dan kami menanti masukan dan saran dari para pembaca.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Tenti Novari Kurniawati
(Direktur Eksekutif)

BAB I
RENCANA STRATEGIS PERKUMPULAN IDEA TAHUN 2022-2027



1. PENDAHULUAN

IDEA didirikan pada 20 Mei 1995 dengan Akta Notaris Winahyu Erwiningsih SH, M.Hum Nomor 25 Tanggal 22 April 2004, dan diperbaharui dengan Akta Notaris Athanasia Dhian Santi, SH, M.Kn Nomor 02 Tahun 2020. Akta tersebut telah diverifikasi dan diresmikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Kemenkumham Nomor No. AHU-0000463.AH.01.08.Tahun 2020. Analitika Indonesia juga telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 0220103611224. Sesuai mandatnya, Perkumpulan IDEA didirikan sebagai bagian upaya mendorong pelembagaan mekanisme politik dan kebijakan publik yang menghormati HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.

IDEA sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian dalam proses transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber daya, karena pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.

IDEA memfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium, kesetaraan dan keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga. Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk mewujudkan kebijakan ini membutuhkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.

IDEA telah berperan dalam berbagai proses transformasi sosial selama kurun waktu 25 tahun organisasi ini didirikan. Peran-peran tersebut adalah mendorong gerakan anti korupsi di Indonesia, menerbitkan berbagai penelitian dan buku tentang sistem penganggaran di Indonesia. IDEA terlibat dalam berbagai jejaring koalisi CSO dalam gerakan anti korupsi, gerakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, gerakan mendorong keterbukaan informasi publik, Open Government Partnership dan tata kelola industri ekstraktif, sumber daya alam, adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana.

2. KONDISI SAAT INI

Penanganan kemiskinan terus dijalankan dan IDEA terus mendorong agar warga tereksklusi semakin mendapat perhatian, terlibat dalam penyusunan anggaran dan pemantauan pelaksanaannya, salah satunya melalui proses audit sosial.

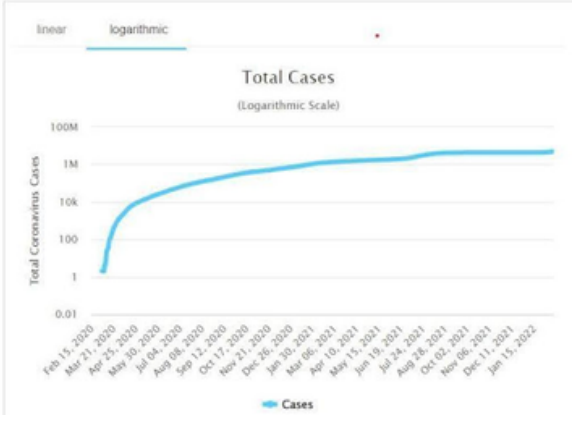
Namun dengan adanya pandemi Covid-19 penanganan kemiskinan menjadi semakin berat. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).

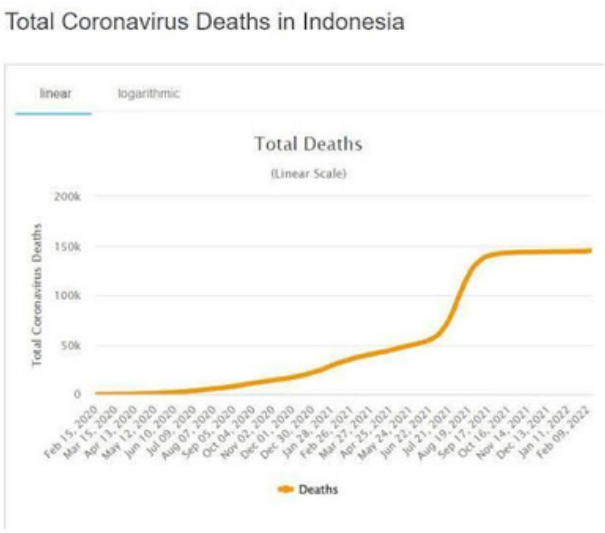
Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 118.859,- (26,14 persen). Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. Kondisi ini tidak beranjak membaik. Secara umum perekonomian Indonesia memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Dua hal menjadi alasan utama di balik krisis ini.

Pertama, semakin banyak populasi yang terinfeksi COVID-19 (termasuk populasi produktif). Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan. Angka pertumbuhan ekonomi. Pada 5 Mei 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -0,74% pada triwulan pertama 2021. Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin (sumber: Al Izzati, website Smeru, 07/26/2021)

Menurut website worldometer (15 Feb 2022), jumlah kasus covid 19 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 adalah sebanyak 4,844,279 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 145,321 orang. jumlah orang terpapar yang telah sembuh sebanyak 4,323,101 orang (lihat grafik berikut).

Total Coronavirus Cases in Indonesia





Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi dengan kasus konfirmasi positif Covid 19 masuk 5 besar di Indonesia. Sampai dengan awal Februari 2022 total terkonfirmasi sebanyak 163.720 orang dengan total korban meninggal dunia sebanyak 5.289 orang.

UNICEF, UNDP, Prospera, and SMERU (2021) melaporkan bahwa dampak Covid-19 di keuangan rumah tangga sangat parah. hampir ¾ rumah tangga mengalami penurunan pendapatan. Bantuan sosial dalam bentuk uang tunai atau sembako membantu hampir semua rumah tangga terdampak. Tetapi juga masih ada yang tidak mendapat bantuan. Pendidikan dan kesehatan anak sangat terdampak. Perubahan metode belajar mengajar yang terpaksa dilakukan secara daring membuat anak, orang tua dan guru frustasi, salah satunya karena akses internet dan ketersediaan gadget yang kurang memadai. Pandemi ini juga melebarkan ketidakadilan gender karena perempuan mendapat tanggung jawab tambahan. Ibu ibu menjadi tiga kali lebih banyak mengurus anak dan pendidikannya karena proses belajar dari dari rumah. Hampir 30% dari responden penelitian mereka menyatakan kekhawatiran mereka tidak bisa memberi makan bagi keluarganya. Pada tahun 2020 proporsi dari rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan sedang atau berat naik menjadi 11,7%. Hal ini utamanya disebabkan karena pengurangan pendapatan dan gangguan sistem distribusi pangan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PP).

Kondisi pandemi juga memaksa peningkatan penggunaan moda komunikasi daring. Peduli Lindungi misalnya, sebagai aplikasi yang digunakan masyarakat dalam mendata, memantau mobilisasi warga dalam hubungannya dengan pandemi Covid 19 mensyaratkan warga untuk mengakses melalui media telepon pintar *(smartphone)*. Hal ini akan merambah ke seluruh sektor seperti Pendidikan dan Kesehatan, mengakibatkan terpinggirkannya warga yang tidak memiliki akses ke telepon pintar (teknologi) dalam mengakses sumber daya publik, seperti misalnya pembelian tiket pesawat dan kereta api.

Krisis keuangan yang dipicu pandemi covid-19 ini juga mengakibatkan bengkaknya hutang negara. Pada September 2021 hutang negara menjadi Rp. 6.711,52 triliun. Rasio utang terhadap PDB adalah 41,38%, meningkat dari bulan sebelumnya yang sekitar 40,85%. Siapa yang paling banyak memanfaatkan hutang tersebut dan Bagaimana hutang tersebut akan dibayarkan, adalah isu yang perlu dicermati lebih lanjut, mengingat bahwa mestinya negara melaksanakan pembangunan untuk mendukung warga keluar dari kemiskinan.

Ditengarai dalam 5 tahun depan akan banyak anggaran negara fokus pada persiapan perpindahan ibu kota dan persiapan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024. Tentunya ini mesti dilihat dampaknya pada anggaran kepentingan publik yang lain.

Situasi tata kelola pemerintah terutama aspek pemberantasan korupsi juga menjadi menjadi isu yang harus diberantas. Transparency International Indonesia telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) pada Selasa 25 Januari 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dan memperoleh skor 38 dimana nilai tersebut meningkat satu poin dari tahun lalu. Ini juga berarti Indonesia masih di bawah rata-rata IPK global, yakni 43.

Situasi global terkait krisis iklim turut menjadi persoalan yang serius akibat atta kelola lingkungan dan sumber daya alam yang buruk. Konferensi tingkat tinggi perubahan iklim (*Conference of the Parties*) COP-26 yang berlangsung pada 31 Oktober - 12 November 2021 lalu sepakat untuk memperbarui komitmen negara negara dalam menghentikan pemanasan global. Hasil yang diharapkan dari COP-26 adalah:

1. Pendanaan dari negara-negara maju untuk memerangi maupun menanggulangi perubahan iklim.
2. Kompensasi dari negara-negara maju atas dampak yang akan menimpa mereka
3. Uang dari kelompok negara maju untuk membantu mereka menerapkan ekonomi yang lebih ramah lingkungan
4. Memastikan komitmen setiap negara untuk mencapai target 2050, yaitu nol emisi dan pengurangan karbon secara progresif pada 2030.

Indonesia sudah sejak jauh hari mempersiapkan diri untuk berkontribusi secara optimal melalui ambisi-ambisi penanganan iklim yang sudah dicatatkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Updated NDC Indonesia, maupun Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021, sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris. Komitmen ini juga telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change.

Perubahan Iklim telah diakui sebagai penyebab meningkatnya frekuensi kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dsb. yang setiap kali terjadi selalu menjadi bencana yang menimbulkan korban harta dan tak jarang, jiwa. Bentuk dan dampak bencana juga terus berkembang. Likuifaksi misalnya, merupakan fenomena yang sebelumnya kurang banyak dipahami awam. Demikian juga dengan pandemi Covid 19 yang merupakan bencana global, di mana hampir seluruh negara tertatih tatih dalam mengatasinya. Untuk itu Indonesia yang dikenal memiliki berbagai bentuk potensi bencana alam, harus memiliki kebijakan dan strategi yang menyeluruh, terpadu dan responsif atas kejadian-kejadian bencana. UU no 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) perlu direvisi, diperkuat dalam hal sistem komando dan kejelasan aturan main yang menyeluruh dan adaptif, termasuk posisi, tanggung

jawab dan wewenang BNPB dan relasinya dengan Lembaga-lembaga lain dalam penanganan bencana. Perhatian IDEA terkait berbagai isu diatas adalah memantau proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program serta evaluasi, dan meyakinkan kelompok kelompok terdampak mendapat manfaat dan dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim maupun bencana alam yang lain.

Isu industri ekstraktif di Indonesia masih menjadi trend dalam pembangunan di Indonesia. Saat ini Indonesia bersiap menuju era transisi energi dari fosil ke non fosil. Ini melatar belakangi terjadinya transformasi perusahaan minyak dan gas menjadi perusahaan energi. Bahkan banyak perusahaan bersiap ke solar energy (EBT). Namun berdasarkan analisa dari dua sumur gas yang ada di Indonesia, perusahan-perusahan energi kita melihat bahwa akan ada ledakan produksi gas di internal mulai 2021 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2028, untuk kemudian perlahan akan mengalami penurunan mulai tahun 2035. Dengan catatan jika sumur gas bertambah maka skenario tersebut akan mengalami perubahan. Di tingkat perusahaan, kebijakan *triple bottom line*, interaksi antara masyarakat, planet and profit terus semakin berkembang. Ketika perusahaan minyak dan gas atau energi beroperasi di lapangan, perusahaan berhadapan dengan konflik di level nasional maupun lokal karena harus berinteraksi dengan negara dan pasar. Interaksi antara perusahaan dan negara berbenturan dengan teknokrasi dan efisiensi dan memaksa perusahaan berinteraksi dengan mekanisme negara. Perusahaan harus berhadapan dengan isu HAM dan transparansi pengelolaan dana bagi hasil migas, termasuk kompensasi penggantian sumber migas dan penempatan hak-hak .

masyarakat adat dalam konstruksi investasi

Dalam konteks tersebut NGO dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk menjembatani kepentingan kepentingan masyarakat vs. perusahaan vs negara. NGO juga bisa berbicara tentang *Green Energy* dan *Ecological Fiscal Transfer* untuk mengelola ekologi menjadi bagian dari rumus transfer fiskalnya. Peluang lain bagi NGO adalah untuk membangun integrasi sosial dalam operasi pertambangan (*extractive industry*) dalam menjamin ketaatan perusahaan dan negara terhadap standar HAM, lingkungan dan integrasi sosial.

Di sisi lain, terjadi perubahan strategi kerja beberapa organisasi masyarakat sipil terhadap perusahaan industri ekstraktif. berbicara tentang kondisi saat ini : 1) ada organisasi masyarakat sipil yang mengubah pendekatan dari *hard advocacy* menjadi *soft advocacy*; 2) banyak perusahaan yang mengalami perubahan pendekatan dan menjaga *sustainability* karena tekanan konsumen yang menuntut perubahan-perubahan yang memiliki standar yang lebih tinggi daripada standar yang disyaratkan pemerintah Indonesia. Meskipun terdapat perubahan pendekatan dari perusahaan ekstraktif karena dorongan konsumen yang mengedepankan keberlanjutan yang memperbesar peluang kerja sama dengan CSO, sampai saat ini IDEA masih konsisten untuk tidak menerima sumber dana dari perusahaan tambang.

Di sisi lain dengan masuknya Indonesia sebagai *Middle Income Country,* Indonesia dipandang lebih mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan pembangunan. Hal ini menjadikan banyak Lembaga donor tidak lagi memprioritaskan Indonesia sebagai negara penerima batuan. Kerja sama dan bantuan

ke CSO banyak dikaitkan dengan misi perdagangan. Saat ini banyak Lembaga donor yang mendorong model kerja sama antara CSO, pemerintah dan sektor swasta, misalnya dengan skema Public Private Partnership (PPP). Namun demikian pemerintah Indonesia juga mulai membuka peluang pendanaan bagi CSO seperti adanya dana Swakelola-3 dan bentuk bentuk Kerja sama lain.

Untuk itu IDEA perlu menggali potensi dan strategi mobilisasi sumber daya (resource mobilization) menyesuaikan kondisi saat ini sebagai bagian dan keberlanjutan upaya IDEA mencapai visinya dengan tetap berpegang pada nilai nilai dan prinsipnya.

3. JATI DIRI IDEA

A. Nilai, VISI dan MISI



Peran dan posisi: IDEA konsisten dan menolak dana CSR dari perusahaan tambang.

Visi Perkumpulan IDEA adalah: Terwujudnya kedaulatan warga di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak dasar.

Misi yang digunakan IDEA untuk mencapai visinya adalah melalui:

1. Penguatan kelompok-kelompok warga untuk perubahan alokasi sumberdaya publik yang lebih adil
2. Mendorong perubahan kebijakan alokasi sumberdaya publik yang inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan
3. Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku publik terhadap alokasi sumberdaya
4. Menjadi organisasi yang kuat dan berkelanjutan

B. Kekuatan

Sebagai perkumpulan yang sudah berjalan lebih dari 25 tahun, IDEA sudah banyak dikenal dan memiliki *skills* dan sumberdaya. IDEA memiliki anggota/pegiat yang beragam sebagai sumber belajar. *Skills* yang dimiliki IDEA antara lain dalam isu-isu sebagai berikut:

- Riset, Analisis dan Advokasi kebijakan publik
- Perencanaan penganggaran pro- poor
- Implementasi demokrasi ekonomi dalam hal transparansi anggaran, kebijakan publik pada level daerah hingga desa.
- Ecological Fiscal Transfer, open contracting
- Audit sosial
- Pengarusutamaan gender
- Pengorganisasian basis
- Pengurangan Risiko Bencana

Keahlian tersebut adalah sebagian dari kekuatan IDEA sehingga IDEA dikenal sebagai tempat rujukan untuk advokasi anggaran. IDEA berpengalaman dalam melakukan melakukan riset dan analisis anggaran, gender mainstreaming dalam EITI, perbaikan tata kelola anggaran yang inklusif pada beberapa isu strategis. IDEA berpengalaman melakukan pengorganisasian di tingkat basis dan advokasi anggaran publik untuk transparansi dan keadilan, berpengalaman mendampingi desa yang transparan dan akuntabel, melakukan proses audit sosial bersama kelompok warga. Pengalaman lain IDEA adalah: Membangun jaringan untuk analisis anggaran dan mendorong partai politik untuk memahami anggaran publik Produksi pengetahuan untuk mendorong perubahan.

IDEA memiliki perencanaan keuangan dan program yang kuat dan berpengalaman mengelola B*udget Resource Center*. Selain memiliki POB organisasi yang relatif lengkap dan dijalankan secara konsisten, IDEA juga memiliki jejaring yang luas di tingkat global dan nasional dalam berbagai isu dan sesuai Nilai-nilai, Visi dan Misi (Publish What You Pay, FOINI, YAPPIKA Actionaid). IDEA juga memiliki jaringan dengan para pengambil kebijakan (dari tingkat desa ke tingkat nasional), NGO di tingkat lokal dan nasional dan warga.

Dewan Konstituante dan Dewan Pengurus menilai IDEA mempunyai kapasitas dan jaringan yang kuat dalam isu energi dalam tiga tahun terakhir. sebagai perkumpulan masih sejalan, sesuai dengan RENSTRA, fokus pada Visi dan Misi sesuai konstitusinya.

Selama ini IDEA juga terus mendorong keberlanjutan lembaga. IDEA memiliki unit AIC dan Unit Knowledge Management sebagai modal untuk keberlanjutan organisasi.

PENGELOLAAN ISU STRATEGIS

- IDEA dirasa masih harus memperhatikan isu baru dengan *ecological fiscal transfer*, training dan advokasi TAKE dan TAPE, memperkuat isu desa, sektor energi dan bencana non alam.
- Masih lemahnya isu mitigasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran.
- IDEA masih perlu memperkuat mobilisasi sumber daya untuk memperoleh pendanaan.

C. Kelompok Sasaran dan Lingkup Kerja

Kelompok sasaran IDEA adalah Kelompok rentan, perempuan dan anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya Ruang lingkup kerja IDEA adalah pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat Global, nasional dan daerah. Lingkup kerja IDEA termasuk pengorganisasian basis meliputi Provinsi wilayah DIY, provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat.

Di Tingkat nasional IDEA menjadi mitra bagi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BNPB, Sekretariat Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

4. CAPAIAN IDEA DALAM PERIODE 2019-2021

Secara organisasi IDEA telah menjadi lembaga yang konstruktif sehingga dapat diterima pada level masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dan nasional. Dalam dua tahun terakhir IDEA juga cukup responsif menjawab pandemi yang tidak diprediksi sebelumnya, dengan bekerjasama dengan FPRB, Dinas Kesehatan, YAPPIKA Actionaid IDEA berpartisipasi dalam vaksinasi dengan sasaran kelompok marjinal.

Dalam memfasilitasi penganggaran pembangunan bagi kelompok rentan, IDEA telah melakukan monitoring dokumen hingga pelaksanaan penganggaran terkait penanganan covid 19 di Pemda DIY. Berdasarkan temuan temuannya IDEA merekomendasikan PEMDA untuk membuka ruang intervensi publik guna menjamin akuntabilitas anggaran.

IDEA menjadi rujukan media terkait monitoring anggaran baik oleh media massa maupun CSO dan pemerintah, dan menjadi rujukan advokasi dalam kebijakan publik.

Capaian IDEA dalam Kinerja Analisis Anggaran Daerah untuk Pemenuhan hak Kelompok Rentan di tengah Pandemi antara lain sebagai berikut:

- Selama pandemi, IDEA mampu mendorong perubahan alokasi anggaran untuk pengadaan jaringan infrastruktur air bersih di Kabupaten Bantul. Ini terjadi setelah IDEA mendampingi paguyuban masyarakat untuk melakukan advokasi anggaran penyediaan pipa air bersih.

- Selain itu IDEA mampu mendorong Keterbukaan Kontrak di era Pandemi
- Berhasil mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY untuk melakukan investigasi internal sebagai dampak publikasi hasil monitoring DANAIS (Dana Keistimewaan) oleh IDEA.
- Perubahan mindset stakeholder terkait dengan anggaran public, misalnya perubahan mindset istri walikota semarang.

Selain itu, IDEA berhasil melakukan penguatan PUG-PPRG dalam Implementasi UU Desa (plus di tengah pandemi). IDEA mampu mendorong PUG di desa dampingan dengan bekerjasama dengan pemda DIY sehingga tersedianya Peraturan Kelurahan tentang PUG dan Rencana Aksi Kelurahan tentang PUG-PPRG.

IDEA juga telah mendorong akuntabilitas sosial, mengembangkan Sosial Audit untuk Pengawasan Pembangunan (ditengah Pandemi) dan penguatan pengelolaan aduan inklusif. IDEA menjadi wadah bagi warga untuk belajar dan praktek audit sosial. IDEA juga berhasil mendorong Pemanfaatan Satu Data untuk Penanggulangan Kemiskinan, mendorong pemilu bersih dan anti politik uang.

Dalam rangka penguatan internal lembaga, IDEA telah memperkuat kapasitas internal untuk Mobilisasi Sumberdaya dan Idea Analitika. IDEA juga telah memiliki sistem pengelolaan organisasi yang baik, meskipun sistem ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.

5. RENCANA STRATEGIS

A. PELUANG

IDEA dalam diskusi penyusunan RENSTRA telah mempelajari dan mengidentifikasi peluang peluang maupun tantangan yang ada untuk periode tiga tahun kedepan. Beberapa peluang ke depan antara lain adalah sehubungan dengan perkembangan penggunaan teknologi komunikasi, yaitu menggunakan teknologi komunikasi untuk membangun komunitas cerdas, dalam mencapai visi IDEA. Komunitas cerdas adalah komunitas yang peduli akan-, dan aktif terlibat dalam- penyusunan penganggaran sumber daya publik dan pemantauan pelaksanaanya. Dengan adanya keterbukaan dan relasi IDEA dengan pemerintah daerah dan pusat, maka ada peluang untuk membangun sinergi strategis dengan pemerintah dan CSO dan pelaku usaha.

Dalam diskusi persiapan RENSTRA banyak diidentifikasi peluang-peluang dari luar, termasuk peluang untuk bekerja sama dengan lembaga lembaga CSO, media yang memiliki arah dan ideologi yang sama. Juga terdapat peluang bekerjasama dengan institusi swasta, membangun kemitraan yang setara untuk kesejahteraan kelompok rentan. Mekanisme kerjasama ini yang mesti lebih jauh disiapkan supaya IDEA mampu membaca dan memanfaatkan peluang di luar dan beradaptasi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai nilainya.

Dalam kaitannya dengan anggaran di masa pandemi maka peluang untuk lobi dan advokasi anggaran menjadi semakin banyak isu yang dapat digarap, dengan tetap tidak kehilangan fokus pada inti perhatian IDEA.

B. TANTANGAN

1.Penggunaan teknologi sebagai media komunikasi menjadikan sebagian masyarakat menjadi terpinggirkan karena kurangnya akses pada teknologi. Ada 3 kelompok warga dalam hal akses ke teknologi sarana komunikasi dalam mengakses sumber daya publik:

- Masyarakat memiliki sarana komunikasi modern dan bijak dalam menggunakannya
- Masyarakat memiliki sarana komunikasi modern tetapi tidak pintar dalam menggunakannya
- Masyarakat tidak memiliki sarana komunikasi

dua kelompok terakhir akan menjadi kelompok yang rentan terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses pelayanan publik karena keterbatasan akses mereka terhadap media komunikasi.

2. Bagi para generasi milenial yang saat ini aktif di media sosial, tantangannya untuk IDEA adalah bagaimana membuat mereka mampu mengisi medsosnya sesuai dengan keadaan disekitarnya mengenai transparansi kebijakan publik, anggaran desa dan lain sebagainya. Mereka paham menggunakan teknologi namun belum memiliki inisiasi untuk mengisi sosmednya dengan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan public.

3. Beberapa tantangan yang lain adalah masih lemahnya pemahaman warga tentang logika anggaran dan pentingnya keterlibatannya dalam penyusunan anggaran; masih rendahnya partisipasi publik dan warga terdampak dalam penyusunan dan pemantauan kebijakan dan alokasi anggaran. Sementara peluang donor dalam isu governance makin menyempit.

4. nformasi dan akses dari pemerintah cenderung terbatas serta pelibatan masyarakat umum masih minim, termasuk minimnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan MONEV pemerintah. Tantangan lain berkaitan dengan pemerintah adalah Kecenderungan antar lembaga pemerintah tidak padu dalam menyikapi suatu persoalan serta birokrasi yang menghambat.

5. Cenderung terjadi regresi (Penurunan secara perlahan) demokrasi, dimana banyak kebijakan yang lebih bersifat top down dan menyempitnya ruang ruang diskusi khususnya bagi warga rentan. UU Cipta Kerja ditengarai sebagai salah satu hasil regresi demokrasi. Regresi demokrasi setidaknya disebabkan oleh 5 hal:

- Isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang semakin terpinggir serta menjadi minoritas dalam diskursus kebangsaan saat ini.
- Adanya fragmentasi pada masyarakat sipil. Hal ini terjadi karena kerja-kerja masyarakat sipil kurang terkonsolidasi dan cenderung fokus pada persoalan parsial sesuai spesifikasinya masing-masing.
- Ketimpangan terhadap akses, baik politik, ekonomi maupun kekuasaan
- Lemahnya posisi tawar masyarakat sipil yang memerankan fungsi advokasi dan pengawas pembangunan, serta menguatnya oligarki menimbulkan kian masifnya praktik koruptif dalam proses tata kelola pemerintahan di Indonesia
- Aparat penegak hukum yang diharapkan mampu memerankan fungsinya sebagai penjaga esensi demokrasi justru cenderung terkooptasi

6. Berkurangnya dana tersedia bagi NGOs sebagai dampak dari status Indonesia sebagai Middle Income Country. Pemerintah juga semakin ketat mengontrol aktivitas Lembaga donor dan NGO Internasional di Indonesia.

7. DEA juga menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan kebijakan tambang bijih pasir sangat minim. Hal ini juga merupakan tantangan bagi IDEA untuk dapat meningkatkan peran perempuan dan warga minoritas lain dalam tata kelola penambangan.

C. AGENDA PRIORITAS

Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan perkumpulan IDEA dan peluang dan tantangan yang ada di luar lembaga maka Agenda Prioritas untuk program IDEA lima tahun kedepan (2022-2027) adalah sebagai berikut.

Agenda Prioritas 1. Mendorong kebijakan alokasi sumber daya publik yang inklusif, terpadu, adil gender, transparan (termasuk transparansi kontrak dan BO) dan akuntabel di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi serta nasional pada isu-isu:

- Layanan penanganan kemiskinan
- Penanganan Covid 19
- Pengurangan resiko bencana
- Kehutanan, lingkungan hidup dan perubahan iklim
- Industri ekstraktif, transisi energi dan energi terbarukan.

Indikator Capaian Agenda Prioritas 1:

1. Tersedianya mekanisme dan akses bagi keterlibatan warga terhadap perencanaan penganggaran, termasuk pengelolaan aduan yang ramah (mudah diakses dan dilaksanakan).
2. Adanya kebijakan afirmatif pemerintah dan pelaksanaannya dalam meningkatkan akses warga rentan terhadap pengelolaan sumberdaya.
3. Pelaksanaan kebijakan satu data dalam perencanaan anggaran dan distribusi bantuan untuk penanganan COVID-19.
4. Adanya publikasi umum sebagai bukti transparansi kontrak dan BO di sektor SDA dan industri ekstraktif, transisi energi dan energi terbarukan.

Strategi untuk mencapai Agenda Prioritas 1:

1. Riset aksi perencanaan penganggaran inklusif gender, transparan dan akuntabel
2. Pengembangan dialog multi pihak untuk membangun mekanisme partisipasi publik yang ramah (*user friendly*)
3. Mendorong pemerintah untuk melakukan *affirmative actions* untuk melibatkan kelompok rentan dalam kebijakan penganggaran, termasuk pendampingan dan asistensi teknis di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten dan desa.
4. Menggalang Kerja sama antar CSO, masyarakat sipil dan media social untuk dalam mengkampanyekan transparansi kontrak dan BO di sektor SDA dan industri ekstraktif
5. Riset dan kampanye implikasi UU Cipta Kerja bagi warga rentan khususnya berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan risiko bencana

Agenda Prioritas 2. Mendorong peningkatan kesadaran publik dan khususnya warga terpinggirkan mengenai transparansi kebijakan dan alokasi anggaran serta ketersediaan akses informasi yang memadai

Indikator Capaian Agenda Prioritas 2:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi kebijakan dan alokasi anggaran
2. Perubahan perilaku dan minat warga terdampak dan warga umum dalam mengakses informasi alokasi anggaran

Strategi untuk mencapai Agenda Prioritas 2:

1. Pendampingan kelompok warga terpinggirkan untuk berdaya dan meningkat perhatian mereka dalam mengakses informasi yang berhubungan dengan kebijakan dan alokasi anggaran
2. Membangun gerakan peningkatan kesadaran publik mengenai transparansi kebijakan dan alokasi anggaran dengan berbagai kegiatan kampanye menggunakan media media yang dapat menjangkau publik secara luas.

Agenda Prioritas 3. Membangun Warga Sebagai *komunitas Cerdas* yang memahami logika alokasi sumber daya publik, aktif terlibat dalam penyusunan dan aktif mengakses informasi pelaksanaan alokasi sumber daya publik termasuk dengan menggunakan teknologi daring.

I**ndikator Capaian Agenda Prioritas 3**: Adanya partisipasi kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya dalam perencanaan anggaran dan pemantauan pelaksanaan alokasi sumber daya publik.

Strategi untuk mencapai Agenda Prioritas 3:

1. Riset aksi untuk peningkatan kapasitas kelompok rentan dalam akses dan penggunaan teknologi telepon cerdas dan partisipasi dalam penganggaran .
2. Meningkatkan pemahaman warga dalam hal logika alokasi sumber daya publik
3. Bekerja sama dengan pihak pihak terkait untuk membangun smart society yang aktif terlibat dalam penyusunan alokasi sumber daya publik yang inklusif.

Agenda Prioritas 4. Penguatan Demokrasi dalam Pemilu 2024

Indikator Capaian Agenda Prioritas 4

1. Terbentuknya kesadaran pemilih akan hak haknya
2. Terbentuknya kelompok kelompok pemilih yang cerdas dan rasional
3. Tersedianya calon-calon pemimpin perempuan yang berkualitas
4. Terdistribusinya anggaran pemilu yang inklusif dan adil
5. Tidak terjadi politik uang dalam pemilu 2024

Strategi untuk mencapai Agenda Prioritas 4:

1. Pendidikan demokrasi bagi pemilih
2. Pemantauan anggaran pemilu
3. Kampanye anti politik uang

Agenda Prioritas 5. Penguatan Tata Kelola Lembaga sebagai Perkumpulan yang solid dan Berkelanjutan

Indikator Capaian Agenda Prioritas 5:

1. Penguatan Sistem dan mekanisme keanggotaan
2. Tersedianya sarana dan mekanisme yang kondusif untuk keterlibatan anggota secara aktif
3. Kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan pekerjaan

4.Penyempurnaan SOP organisasi terlaksana sesuai dengan kebutuhan secara reguler.
5. Alokasi anggaran dan mekanisme yang jelas untuk penguatan kapasitas anggota dan pegiat
6. Monitoring dan evaluasi internal berjalan secara reguler dan digunakan menjadi salah satu dasar perencanaan berikutnya.

Strategi untuk mencapai Agenda Prioritas 5:

1. Mengkaji dan merevisi sistem dan mekanisme keanggotaan untuk lebih dapat mengakomodir peran dan manfaat bagi anggota
2. Mengkaji peran dan fungsi Dewan Konstituante
3. Mengkaji peningkatan kapasitas SDM pelaksana
4. Memfasilitasi penyusunan dan atau revisi SOP ketenagakerjaan, termasuk *system recruitment*, system remunerasi (gaji dan tunjangan) pegiat dan SOP pengembangan kapasitas.
5. Menyediakan tim administrasi manajemen keuangan yang kuat agar mampu mengimplementasikan POB keuangan dengan baik.

Agenda Prioritas 6. Penguatan Penggalangan Sumberdaya.
IDEA harus memiliki strategi strategi dan panduan penggalangan sumber daya (*resource mobilization*), termasuk sumber dana, sumber daya manusia (relawan) dan jaringan sebagai upaya berkesinambungan mencapai visi IDEA.

Kedepan IDEA akan mengambil peran *Co-Management* (manajemen bersama) dengan - membentuk kelompok-kelompok kolaboratif dalam forum multi stakeholder untuk mewadahi kepentingan semua pihak terutama masyarakat terdampak industri ekstraktif dengan mengedepankan People-Public-Private Partnership (P4). IDEA harus memiliki kemampuan rasional dan teknis yang berpihak kepada masyarakat, serta pertimbangan fiscal transfer.

Indikator Capaian Agenda Prioritas 6:

1. Tersedianya arahan internal untuk bekerja sama dengan pihak luar, Lembaga donor dan swasta, dana pemerintah serta CSR, dana kompensasi dan dana dari masyarakat
2. Tersedianya arahan kerja sama dalam skema *People Public Private Partnership* (P4)
3. Peningkatan kerja sama dan mobilisasi sumber daya dengan pihak luar
4. Unit usaha IDEA berkembang dengan baik.

Strategi untuk mencapai Agenda Prioritas 6:

1. Melakukan kajian Analisis manfaat dan risiko untuk berbagai bentuk sumber dana dan sumber daya, termasuk dana CSR, kompensasi, relawan.
2. Menyusun panduan kerja sama dengan pihak luar (individu, Lembaga) sebagai bagian dari upaya penggalangan sumber daya
3. Memfasilitasi penyusunan konsep dan arahan kerjasama multipihak *People Public Private Partnership*
4. Mendorong Kerja sama dengan para pihak untuk mewadahi kepentingan semua pihak, terutama warga terdampak

Agenda Prioritas 7. Peningkatan layanan IDEA sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi.

Indikator Capaian Agenda Prioritas 7:

1. Tersedianya sistem pengelolaan pengetahuan (pengumpulan, analisis dan distribusi) dan tersedianya sistem monitoring penggunaannya.
2. Penggunaan pengetahuan dari IDEA untuk pengembangan program dan advokasi oleh IDEA maupun pihak lain.
3. Tersedianya layanan yang lebih luas dengan inovasi pemanfaatan teknologi (digital).

Strategi untuk mencapai Agenda Prioritas 7:

- Memperkuat tim dalam pengelolaan divisi
- Mendukung proses advokasi dan dialog dengan penyediaan informasi dalam berbagai bentuk sesuai target penerimanya
- Mendorong penyebaran informasi yang ramah, mudah diakses dan digunakan bagi kelompok sasaran
- Membangun jaringan dengan para pihak pengelola pengetahuan untuk memperluas dampak dari penggunaan pengetahuan. (LOKADAYA, Jejaring CSO anti korupsi, dll).



STRUKTUR ORGANISASI

ANGGOTA:

Achmad An'am Thamrin, Agam Fatchurrochman, Akhmad Nasir, Dati Fatimah, Deddy Heriyanto, Deni Purwo Sambodo, Farida Mahri, Maria Bernadette, Muchtar Abbas, Muhammad, Ridya La OdeNgkowe, Sri Hidayati, Sunarja, Tiem Farikhah, Valentina Sri Wijiyanti, Wahyu Widiarto, Wasingatu Zakiyah, Yohannes Da Masenus Arus, Sumarti Sukaningsih, Tenti Novari Kurniawati, Asri Budiarti, Anis Nuria Perwitasari, Ahmad Hedar, Desty Roosdiana Ika Kusumawati, Galih Pramilu Bakti, Muhammad Djindan, Muhammad Bustom, Yusnita Ike Christanti







PELAKSANA HARIAN:

Ketua: Tenti Novari Kurniawati
Manajer Program dan Pengelolaan Pengetahuan: Ahmad Hedar
Manajer Program: Isnawati
Staf Program: Ferina Anistya F | Nur Khofifah | Meigita D Utami | Galih Pramilu Bakti
Staf Keuangan: Nani Wudjiyanti | Sari Biwantari | Endang Trisnaningsih | Eny Sudarwati | Sisca D Tresnaningsih
Staf Admin & Operasional: Andi Apriyanto | Hanik Kusumastuti | Wahyu Rusdiyanto

WILAYAH KERJA



WILAYAH PROVINSI

- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DAERAH KHUSUS JAKARTA
- JAWA TIMUR
- JAWA TENGAH
- JAWA BARAT
- KALIMANTAN BARAT
- SULAWESI SELATAN
- SULAWESI TENGAH
- SUMATERA UTARA
- NUSA TENGGARA TIMUR

WILAYAH KABUPATEN

- KABUPATEN BANTUL
- KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- KABUPATEN KULON PROGO
- KABUPATEN SLEMAN
- KOTA YOGYAKARTA
- KOTA SURAKARTA
- KOTA SEMARANG
- KABUPATEN SERANG
- KABUPATEN SUMEDANG
- KABUPATEN SUMENEP
- KABUPATEN BOJONEGORO
- KABUPATEN BLITAR
- KABUPATEN SIDOARJO
- KABUPATEN BANYUWANGI
- KABUPATEN LAMONGAN
- KOTA MADIUN
- KABUPATEN BELU
- KABUPATEN MANGGARAI BARAT
- KABUPATEN SABU RAIJUA
- KABUPATEN SUMBA TIMUR
- KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
- KABUPATEN SAMBAS
- KABUPATEN LUWU UTARA
- KABUPATEN MOROWALI UTARA

PROGRAM DIKELOLA IDEA TAHUN 2022-2024

- *Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networKs* (SPEAK) di Kota Semarang dan Bojonegoro
- *Employment of poverty information system to increase the quality of participatory and accountable planning, budget-allocating and monitoring of poverty alleviation program* di DIY
- Membangunan Ketangguhan Bencana di Pasigala
- Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Desa Mandiri Budaya dan Rintisan Desa Mandiri Budaya di DIY
- Pelaksanaan Vaksinasi Inklusif Covid 19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Monitoring dan Evaluasi SP4N LAPOR
- *Technical Assistance on Local Solutions for Village Budget Transparency* di 7 daerah (Kab. Sambas, Kab. Serang, Kab. Sumedang, Kota Surakarta, Kota Madiun, Kab. Sumenep, Kab.Luwu Utara)
- Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) untuk mendorong Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia di 10 daerah (Kab. Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Banyuwangi, Lamongan, Belu, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara)
- *Engaging communities in a just transition* di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperkuat Integritas Pemilih dan Ketahanan Terhadap Politik Uang di 5 daerah (Daerah Khusus Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur).



KEGIATAN UTAMA

1. 18-19 JANUARI 2022- LOKAKARYA NASIONAL MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN WARGA

2. 25-27 APRIL 2022 - CLOSING MEETING PROGRAM SPEAK DENGAN PEMERINTAH LOKAL DANKOMUNITAS PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN BOJONEGORO

3. 22 OKTOBER 2022 DAN 2 NOVEBVER 2022 - KICK OFF MEETING ERAT DI JAWA TIMUR DAN NTT

4. 26-27 JULI 2023 - LOKAKARYA NASIONAL PENULISAN PRAKTEK BAIK 7 DAERAH

5. 29-30 MEI 2024 - LOKAKARYA NASIONAL PENULISAN MODUL INTEGRITAS PEMILIH 5 DAERAH

IDEA DALAM ANGKA

10.000+ PENERIMA MANFAAT PROGRAM DI BERBAGAI DAERAH

200+ KEGIATAN YANG DIIMPLEMENTASIKAN

30+ PRODUK PENGETAHUAN YANG TERDIRI DARI KAJIAN DAN ANALISIS, POLICY BRIEF, DOKUMEN PRAKTIK BAIK, PERS RILIS, BUKU DAN MODUL;

10+ PROGRAM YANG DIIMPLEMENTASIKAN

BAB II
PROGRAM IDEA 2022-2024



AGENDA PRIORITAS 1. MENDORONG KEBIJAKAN ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK YANG INKLUSIF, TERPADU, ADIL GENDER, TRANSPARAN (TERMASUK TRANSPARANSI KONTRAK DAN BO) DAN AKUNTABEL DI TINGKAT DESA, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI SERTA NASIONAL

MEMASTIKAN HAK ATAS KESEHATAN: VAKSINASI COVID 19 INKLUSIF BAGI KELOMPOK RENTAN

Status Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PP) di Provinsi DIY kembali naik per 7 Februari 2022 menjadi level 3. Padahal, sebelumnya, selama tiga bulan lebih, terhitung per 19 Oktober 2021 hingga 6 februari 2022, status di Provinsi DIY turun menjadi level 2. Status PP level 3 menunjukkan kembali naik nya angka infeksi dan penyebaran virus covid-19. Jika melihat angka kasus konfirmasi harian dalam 60 hari terakhir di Provinsi DIY, kasus penambahan di DIY memang mulai meningkat kembali sejak tanggal 6 Februari, saat itu tercatat ada 280 pasien konfirmasi positif covid-19, kasus kemudian meningkat signifikan hingga mencapai puncaknya pada 24 Februari 2022 yang mencapai 2.866 pasien konfirmasi positif covid-19.

Dalam situasi demikian, percepatan program vaksinasi menjadi sangat penting untuk membentuk herd immunity di tengah-tengah masyarakat. Naiknya angka konfirmasi positif di DIY memang disebabkan oleh banyak variabel, seperti mutasi virus sars dari delta ke omicron, hingga kemungkinan turunnya eifikasi vaksin covid-19. Oleh karena itu, booster vaksinasi untuk meningkatkan imunitas masyarakat terhadap mutasi virus covid-19 perlu dilakukan. Jika merujuk data dinas kesehatan DIY, vaksinasi dosis ketiga (booster) untuk warga di DIY masih sangat rendah. Per 1 maret 2022, capaian vaksinasi dosis ketiga di DIY baru mencapai 10%, dengan jumlah penerima vaksin sebanyak 292.373. Sedangkan DIY

sendiri memiliki target sasaran vaksinasi sebanyak 2.879.699. Artinya masih sangat banyak dari jumlah sasaran tersebut yang perlu diintervensi vaksin dosis 3, terutama kelompok-kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Berdasarkan sasaran, jumlah vaksin dosis ketiga di DIY baru menyasar tenaga kesehatan, pelayanan publik, lansia dan umum.

Sasaran vaksinasi booster perlu dilakukan dengan memetakan prioritas kelompok rentan, terutama kelompok difabel yang secara data pilah belum cukup memadai. Berdasarkan kertas kebijakan yang disampaikan FPRB DIY ke pemerintah provinsi DIY, data pilah yang menunjukkan difabel terpapar Covid-19 tidak tersedia di laman website corona.jogjaprov.co.id. Sementara data pilah akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan serta implementasi dalam penanganan Covid-19 yang inklusif disabilitas.

Situasi tersebut terkonfirmasi dari fakta berikut:

1. Tidak tersampaikannya informasi yang memadai terkait Covid -19 yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diakses oleh difabel terutama difabel netra dan tuli.
2. Belum tersedianya data difabel yang meliputi: konfirmasi positif, dinyatakan sembuh, yang menjalani isolasi, telah divaksin, belum divaksin.
3. Tidak tersedianya shelter yang aksesibel bagi difabel terutama difabel netra dan fisik pengguna alat bantu kursi roda, sehingga terjadi penolakan pada difabel netra di salah satu shelter yang dikelola oleh pemerintah dan meminta difabel melakukan isolasi mandiri di rumah.
4. Penyelenggaraan vaksin bagi difabel oleh pemerintah yang dipisahkan dengan masyarakat umum dengan sistem kuota terpusat/ tersentral dan dibatasi waktu pelaksanaannya menyulitkan difabel dalam mengakses.



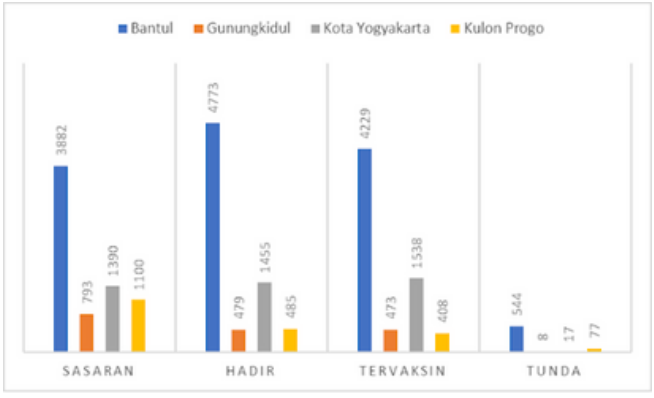
5. Tidak tersedianya edukasi vaksin yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjangkau difabel beserta keluarganya, sehingga terjadi beberapa penolakan vaksin oleh keluarga difabel.
6. Belum adanya kesempatan partisipasi difabel dalam upaya mitigasi dan penanganan Covid-19.

Peran Masyarakat Sipil dalam Kolaborasi Percepatan Vaksinasi Selama situasi pandemi, IDEA bersama dengan Yappika Actionaid, FPRB-DIY, SONJO serta beberapa kelompok masyarakat sipil dan individu di DIY turut berpartisipasi dalam melakukan akselerasi vaksinasi untuk kelompok rentan di DIY terutama untuk vaksinasi dosis ketiga (booster)

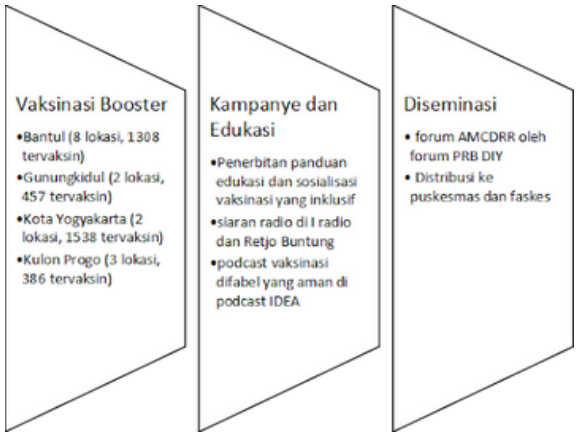
IMPLIKASI PROGRAM

Program vaksinasi booster yang inklusif mendukung percepatan program vaksinasi di DIY dengan total orang yang divaksin sekitar 1.148.838 atau atau 39,89% dari total 3.181.285 target sasaran. Rincian dari kelompok rentan yang telah divaksin bekerjasama dengan PKBI DIY adalah:

- Transpuan : 20 Orang
- Pekerja Seks : 36 Orang
- Difabel : 2 Orang
- Lansia : 51 Orang
- Warga dimarginalkan : 6 Orang
- Warga Surokarsan : 173 Orang
- Masyarakat Umum : 526 Orang



Selain vaksinasi untuk kelompok rentan dan masyarakat umum, program vaksinasi inklusif juga melaksanakan kampanye dan edukasi kepada publik dengan cakupan pendengar untuk edukasi dan sosialisasi melalui siaran radio di Retjo Buntung Jogja adalah I Radio adalah ribuan pendengar. Selain itu, siaran talkshow juga diredistribusi Idea ke publik melalui whatsapp group dan jejaring komunitas. Buku panduan vaksinasi inklusif selain didistribusikan ke puskesmas, kalurahan dan faskes lain, juga dipamerkan dan didistribusikan di forum-forum nasional, misalnya dalam acara Forum GPDRR. Yappika dan FPRB DIY berbagi dalam subtema Inclusion Advocacy for vulnerable groups in the COVID-19 pandemic response.



banyak orang. Resiliensi atau ketangguhan hanya dapat diwujudkan apabila upaya tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan secara berkelanjutan dan inklusi kelompok rentan terlindungi dari penyebaran Covid 19 setelah vaksin booster.



Pelaksanaan Forum GPDRR (Global Platform Disaster Risk Reduction) di Bali, 23-28 Mei 2022. Di Forum tersebut, Yappika, Perkumpulan IDEA dan FPRB DIY berbagi dalam subtema Inclusion Advocacy for vulnerable groups in the COVID-19 pandemic response. Kredit Foto: UNDRR/Antoine Tardy.

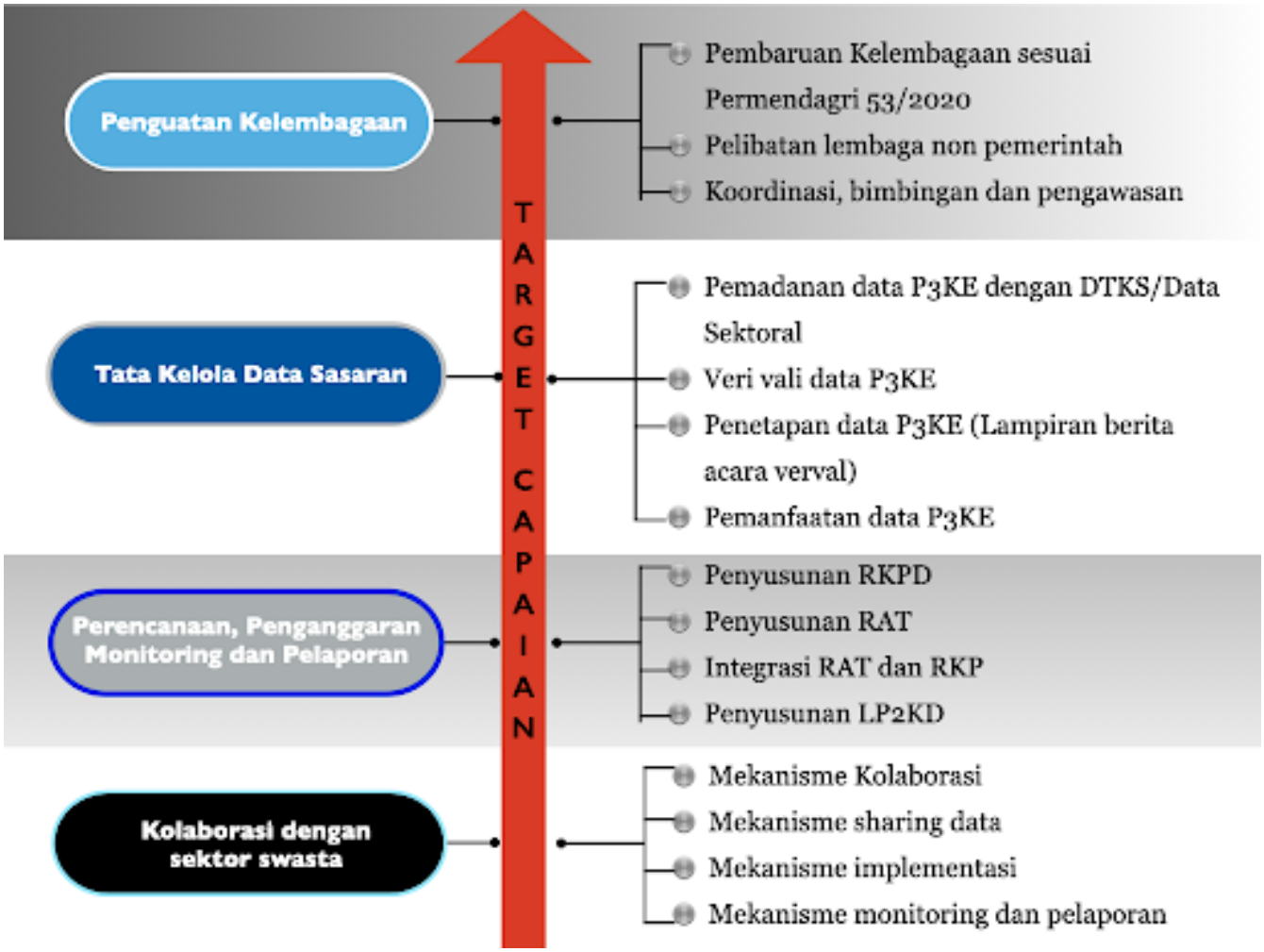
Terselenggaranya program ini menegaskan peluang bangkitnya kesejahteraan kelompok rentan khususnya aspek keadilan sosial pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar warga serta afirmatif negara terhadap kebutuhan tersebut. Perubahan sosial yang tampak disini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada layanan medis sangat baik, sekaligus membuka ruang partisipasi aktif multi aktor (pemerintah dan non pemerintah), termasuk kelompok rentan peserta vaksin yang memperlihatkan bahwa integrasi sosial dengan mengedepankan kultur kegotong-royongan masih mampu eksis sebagai solusi pengentasan eksklusi sosial.

Pembelajaran program vaksinasi yang inklusif adalah pentingnya ada kelonggaran waktu dalam penyelenggaraan vaksinasi untuk kelompok-kelompok khusus. Hal tersebut agar dapat meningkatkan jangkauan penerima vaksin yang terbatas dari sisi data dan edukasi pra vaksinasi. Selain itu, Sistem data pilah penyelenggaraan vaksinasi perlu perbaikan, akan diadvokasi bersama dengan adopsi kebijakan vaksinasi booster inklusif.

DARI KEMISKINAN EKSTREM MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pemerintah Indonesia melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022: "Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim" menargetkan Ketepatan Sasaran, Keterpaduan, dan Sinergi Multi Pihak, ditugaskan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan seluruh Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah juga menetapkan lokasi prioritas dan target penghapusan kemiskinan ekstrem dan data P3KE sebagai evidence based policy dan mengkoordinasikan partisipasi non pemerintah.

IDEA pada tahun 2022-2023 mengimplementasikan program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) untuk mendorong Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia di Provinsi Jawa Timur maupun Nusa Tenggara Timur. Proses kerjasama dengan pemerintah Provinsi dan kabupaten diawali dengan kegiatan Kick Off Meeting di masing-masing Provinsi dengan melibatkan 10 kabupaten yaitu, Banyuwangi, Blitar, Lamongan, Sidoarjo dan Sumenep di Jawa Timur, serta Kabupaten Sumba Timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Timor Tengah Utara dan Belu di Nusa Tenggara Timur.



Intervensi yang diberikan untuk mencapai target tersebut diawali dengan penilaian cepat (Rapid Assessment) terhadap situasi penanggulangan kemiskinan di masing-masing pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya gap di antara masing-masing daerah, mulai dari gap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) hingga tata kelola data dan perencanaan. Hasilnya untuk memperbaiki gap tersebut melalui penyusunan rencana kerja (workplaning) intervensi bersama-sama dengan seluruh pemerintah daerah.

Asistensi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah pelaksana utama (driver) penanggulangan kemiskinan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial. Berikut adalah rangkuman jumlah intervensi yang diberikan berdasarkan jenis intervensi. Tujuan intervensi:

- Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
- Meningkatkan kualitas tata kelola data sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di daerah dilakukan untuk merespon kebijakan pemerintah Pusat, terutama kebijakan yang menempatkan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTT sebagai Wilayah Pilot Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Di Tingkat Provinsi, baik Provinsi Jatim dan Provinsi NTT merupakan dua provinsi pilot penanggulangan kemiskinan ekstrem. Regulasi penanggulangan kemiskinan provinsi, selain tertuang dalam regulasi pemerintah daerah mengenai RPJMD maupun perubahan RPJMD,

Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Gubernur NTT No.39 Tahun 2016 tentang Strategi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2020. Merespon kebijakan pusat tentenga Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Inpres no 4/2022), saat ini Pemerintah Provinsi masih mempersiapkan regulasi terkait. Masing-masing provinsi memiliki strategi yang berbeda dalam menunjukkan komitmen dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Dalam penyusunan RPKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, TKPK memasukkan prioritas wilayah percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sementara RPKD Provinsi NTT belum memiliki strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem. TKPK Provinsi Jawa Timur mampu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun RPKD dan menerbitkan SK TKPK Kabupaten/Kota. Dari 5 Kabupaten Wilayah Kerja USAID ERAT, hanya Kabupaten Sumenep yang belum memiliki RPKD. Sedangkan di Provinsi NTT, mayoritas masih dalam proses perencanaan penyusunan RPKD, kecuali Kabupaten Sumba Timur.

Komitmen Pemerintah terhadap Penanggulangan Kemiskinan tidak selalu diikuti dengan program-program inovasi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem. JATIM SATYA (Jawa Timur Sejahtera dan Mulia) menjadi inti program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat

miskin. Bentuk programnya meliputi bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan individu, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan UM, serta program penanggulangan kemiskinan pro rakyat lain.

Provinsi Jawa Timur memiliki program penanggulangan kemiskinan andalan, salah satunya JATIM PUSPA (Pemberdayaan Usaha Perempuan) dan PKH Plus. Belakangan muncul program Dharma Bhakti Nagari untuk menggenjot menurunnya angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Sementara Pemerintah Provinsi NTT mengembangkan teori perubahan yang dibangun dari masalah kemiskinan konsumsi dan 10 bidang non konsumsi dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan ketahanan fisik SDM kelompok masyarakat miskin, penyediaan sarana dan prasarana permukiman layak, perlindungan dan pemberdayaan sosial dan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Di tingkat kabupaten/kota, komitmen pemerintah ditunjukkan secara beragam baik di wilayah Jawa Timur maupun NTT. Di Jawa Timur, dari 5 wilayah kabupaten intervensi kemiskinan ekstrem USAID-ERAT, hanya Pemerintah Kabupaten Sumenep yang terkesan kurang responsif terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Lima kabupaten di Provinsi NTT secara terbuka menanggapi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan mempercepat perencanaan penyusunan dokumen RPKD dan mengaktifkan kelembagaan TKPK di tingkat kabupaten.

aik TKPK Provinsi Jawa Timur maupun TKPK Provinsi NTT memiliki kelembagaan TKPK dan didukung keberadaan sekretariat TKPK, meskipun tidak selalu diikuti dengan dukungan operasional yang cukup. Kedua provinsi memiliki SK TKPK yang diperbaharui secara periodik. TKPK Provinsi Jawa Timur memiliki struktur organisasi yang beranggotakan OPD, Perwakilan Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta. TKPK Provinsi NTT beranggotakan OPD sepenuhnya. Ada keraguan untuk melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam struktur TKPK. Di kedua provinsi memiliki sekretariat TKPK yang dilengkapi sumberdaya dan dukungan operasional yang minimal dalam mendinamisasi tim. Peningkatan kapasitas tim terkait peran dan fungsi belum menjadi agenda rutin TKPK. Rapat koordinasi menjadi ajang dalam memperbaharui informasi mengenai kebijakan terbaru di Jawa Timur terutama di lingkup OPD dan Pemerintah Kabupaten. 5 Kabupaten wilayah kerja USAID ERAT di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTT sudah memiliki SK TKPK, namun pada umumnya struktur belum berjalan. Atau kegiatan yang ada masih menjadi bagian dari Bappeda/Bapelitbangda di masing-masing wilayah.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim bervariasi di dua provinsi. Di Provinsi Jawa Timur, pemerintah memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk program-program penanggulangan kemiskinan baik mengikuti program reguler OPD maupun anggaran program penanggulangan kemiskinan lain seperti JATIM PUSPA (Pemberdayaan ekonomi perempuan), Dharma Bhakti Nagari dsb. Selain itu juga alokasi anggaran untuk membangun sistem data



Bimtek dan Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggullangan Kemiskinan Daerah yang diikuti seluruh TKPK Kabupaten/Kota serta TKPK Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Doc IDEA

kemiskinan "SINTAGELIS". Jawa Timur juga memanfaatkan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan. Di Provinsi NTT Alokasi anggaran kemiskinan mengikuti program masing-masing OPD yang sasarannya ditujukan kepada penduduk miskin.

Pengarusutamaan Gender Equality, Disability and Social Inclusion

Partisipasi Publik dan Inklusi Gender-Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan lebih kuat di Provinsi Jawa Timur dibandingkan di Provinsi NTT. Provinsi Jawa Timur selangkah lebih maju dalam melibatkan masyarakat sipil seperti unsur organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam struktur TKPK dan unsur sektor swasta seperti Bank Jatim, BPR Jatim dan Forum penyelenggara tanggungjawab sosial perusahaan. Sementara Provinsi NTT masih ragu-ragu untuk melibatkan unsur masyarakat sipil. Dalam hal inklusi gender-sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan analisis data DTKS tentang jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan, terutama dalam Desil 1,2,3 dan 4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membuat inovasi program andalan yang selaras dengan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur yang menyasar pada perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga melalui Jatim Puspa.

Sementara di Provinsi NTT, intervensi pemerintah daerah lebih fokus pada pemerataan pangan melalui program "Tanam Jagung Panen Sapi". Pelibatan masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan dilakukan pemerintah di dua provinsi dalam proses-proses perencanaan pembangunan, namun belum dilakukan dalam proses-proses perencanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Di Lima Kabupaten di Jawa Timur, hanya Kabupaten Banyuwangi yang memiliki rekam jejak partisipasi publik dan inklusi gender dalam proses perencanaan pembangunan dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya. Di 5 kabupaten di NTT, pada umumnya belum tampak hasilnya terutama karena TKPK tidak aktif dan proses penyusunan RPKD juga baru saja dimulai.

IMPLIKASI PROGRAM

Updating, verifikasi dan validasi data kemiskinan Provinsi Jawa Timur lebih tertata dengan aplikasi SINTAGELIS. Sedangkan Provinsi NTT tidak menggunakan aplikasi khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Program ERAT menghasilkan 4 capaian yaitu, pertama: kedua provinsi telah menggunakan sumber data P3KE untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu, menguatnya Tata kelola Data Sasaran yang ditandai dengan peningkatan kualitas data sasaran di daerah dengan mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan pemadanan data P3KE dengan DTKS atau data sektoral, Verval data P3KE, Penetapan data P3KE beserta lampiran berita acara verval dan pemanfaatan data P3KE. Perubahan kualitas data sasaran terjadi di 10 kabupaten yang ditandai dengan turunnya angka inclusion error dengan penurunan jumlah aggregate data seperti NIK ganda, penerima bantuan ganda, keluarga dengan status TNI POLRI dan ASN, dan keluarga tanpa NIK.

Kedua, Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur juga sudah memiliki dokumen RAT tahun 2022 (Jawa Timur) dan RAT tahun 2023 (Jawa Timur dan NTT) dan dokumen LP2KD tahun 2021 untuk masing-masing provinsi. Sementara di tingkat kabupaten, masih sebagian kecil kabupaten yang sudah memiliki RPKD, terutama di Provinsi NTT dari 5 kabupaten, hanya Kabupaten Sumba Timur yang sudah memiliki RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah).

Ketiga, Upaya asistensi teknis, memberikan dampak terhadap menguatnya peran TKPK Provinsi dan Kabupaten dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang ditandai dengan: 1) Penguatan kapasitas dan aktivasi kelembagaan TKPK di tingkat provinsi dan kabupaten; 2) Menyediakan sumberdaya perlu melakukan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang telah dilakukan selama ini, terutama untuk mengetahui efektivitas serta level dampak yang bisa dicapai atas pelaksanaan program-program tersebut.

Hasil evaluasi tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail kepada TKPK model program seperti apa yang sebaiknya dijalankan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga, kedepan, hasil evaluasi ini akan menjadi input perencanaan yang lebih baik. 3) Pendampingan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten untuk berkoordinasi dan diskusi serial dengan sektor swasta dalam rangka mencapai sinergitas intervensi program penanggulangan kemiskinan. Sebab, di Jawa Timur sudah terdapat forum CSR yang sudah berjalan sejak 2016. 4) Dukungan kepada TKPK Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan overlay dan analisis data kemiskinan dari berbagai sumber untuk mereview skala prioritas program dan focus wilayah intervensi, serta inovasi strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem..



Forum Pembelajaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya. Doc IDEA

Keempat, program juga berhasil meningkatkan tata kelola perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan kolaborasi dengan sektor swasta. Upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk menyusun perencanaan program, kegiatan dan anggaran. Sementara untuk kolaborasi dengan sektor swasta, USAID ERAT memberikan asistensi melalui workshopkepada TKPK Provinsi dan Sektor Swasta dalam membangun kerjasama kolaborasi melalui pemanfaatan data sasaran dan konvergensi program antara pemerintah dan swasta.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bersinergi dan berkoordinasi intensif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kelembagaan TKPK di daerah berjalan lebih dinamis dan intens melakukan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Beberapa kabupaten mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

AGENDA PRIORITAS 2

MENDORONG PENINGKATAN KESADARAN PUBLIK DAN KHUSUSNYA WARGA TERPINGGIRKAN MENGENAI TRANSPARANSI KEBIJAKAN DAN ALOKASI ANGGARAN SERTA KETERSEDIAAN AKSES INFORMASI YANG MEMADAI.

MEMPERKUAT SOLUSI LOKAL UNTUK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA: BERGERAK DAN MENYEBARKAN CERITA YANG BERDAMPAK

IDEA didukung oleh USAID-MADANI melalui program "Bantuan Teknis Solusi Lokal Transparansi Dana Desa" memberikan asistensi kepada tujuh Lead Partner (LP) di wilayah Kabupaten dan Kota, yang fokus programnya pada isu peningkatan pengelolaan dana desa. Ketujuh mitra tersebut ialah: Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Serang (Banten), Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Sumedang (Jawa Barat), Kompip Kota Surakarta (Jawa Tengah), Yayasan Bambu Nusantara Kota Madiun dan Lakpesdam NU Kabupaten Sumenep (Jawa Timur), Perkumpulan Wallacea Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Gapemasda Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat)

Rangkaian kegiatan asistensi teknis bersama LP serta melibatkan FC (Field Coordinator) dan LF (Local Facilitator), antara lain: Capacity need assessment training dengan Materi training yang diberikan tentang knowledge management, pengarusutamaan GEDSI untuk pembangunan desa, transparansi dana desa, hal warga dan kewajiban negara, advokasi kebijakan dan pengembangan BUMDesa dan asistensi teknis. Asistensi teknis yang diberikan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan teknis bagi mitra utama MADANI serta anggota forum pembelajaran

IMPLIKASI PROGRAM

Capaian program asistensi teknis kepada 7 lead partner adalah memperkuat solusi lokal di 2 aspek, yaitu pemetaan kebutuhan memperkuat internal organisasi terutama di aspek knowledge management dan penguatan gerakan advokasi. Solusi lokal yang sudah dirumuskan adalah keterlibatan kelompok rentan untuk mewujudkan desa inklusi yang ramah terhadap perempuan dan anak, mewujudkan BUM Desa yang inklusif, alokasi anggaran desa atau kelurahan yang memiliki prioritas terhadap kelompok rentan. Pendampingan pengorganisasian warga dan advokasi kebijakan, dapat memantik kelompok dampingan (learning forum) memiliki kesadaran dan kemauan terlibat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan monitoring pembangunan.

Penguatan knowledge management menjadikan kapasitas lead partner menjadi meningkat dengan pengembangan penataan sistem data dan informasi di internal organisasi agar data dan informasi dapat dimanfaatkan untuk penggalangan sumber daya maupun memperkuat kerja-kerja advokasi dan reputasi serta kredibilitas organisasi.

Program asistensi teknis menghasilkan dokumentasi 13 cerita praktik baik dari 7 CSO yaitu: Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Serang (Banten), Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Sumedang (Jawa Barat), Kompip Kota Surakarta (Jawa Tengah), Yayasan Bambu Nusantara Kota Madiun dan Lakpesdam NU Kabupaten Sumenep (Jawa Timur), Perkumpulan Wallacea Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Gapemasda Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat).

Kota Madiun menekankan pentingnya Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Di Kota Madiun Yang Inklusif dan pentingnya Kolaborasi Pemerintah Dengan Forpemma Dalam Memperkuat Kelurahan Mandiri Berkelanjutan. Kota Surakarta menghasilkan cerita praktik baik: Mengubah "Noice" Menjadi "Voice": Geliat Kelompok Pekka Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Kelurahan Mojosongo . Sementara itu, Kabupaten Sumenep fokus kepada Jasa Dan Usaha Yang Diidentifikasi Secara Partisipatif Berbasis Masyarakat dan bagaimana Mengelola Bumdesa Yang Berbasis Masyarakat.

Kabupaten Luwu Utara berhasil mengadvokasi Komitmen Pemerintah Desa Pincara Mendorong Pelibatan Kelompok Rentan Dalam Proses Pembangunan Desa Yang Inklusi. Kabupaten Sambas menekankan pentingnya Musyawarah Khusus Perempuan Untuk Anggaran Desa Yang Inklusif dan Kadin (Kampung Edukasi, dan Literasi Anggaran Dana Desa Inklusif) Sebagai Motor Penggerak Menuju Dana Desa Yang Inklusif. Sedangkan Kabupaten Sumedang berhasil menguatkan Jaring Aspirasi Kader Pintar Untuk Perencanaan Desa Yang Lebih Partisipatif dan Menembus Batas Dominasi Laki-Laki Di Organisasi Kader Pintar Desa Kadakajaya. Replikasi Madrasah Anggaran Kader Pintar Untuk Desa Ciherang Menuju Perempuan Lebih Berdaya.

Kabupaten Serang mendokumentasikan praktik baik Kerjasama Kolaborasi Menciptakan Kepercayaan Pemda Terhadap Oms dan Mawar Desa Berkontribusi Dalam Membangun Domas Yang Sejahtera. Adanya peningkatan kapasitas MAWAR DESA untuk CSC (*Community Score Card*) guna menilai pelayanan pemerintah desa. Meningkatnya kapasitas mawar desa tidak lepas dari perjuangan anggota mawar desa yang konsisten mengikuti workshop peningkatan kapasitas yang diberikan oleh LP, DSP, PSP dan LF dari mulai apa itu CSC, alat atau tools yang digunakan untuk menilai suatu pelayanan pemdes dan bagaimana cara menilai menggunakan alat atau tools tersebut. Mawar Desa Juga mampu mengadvokasi kebijakan perdes pengelolaan sampah dan DERAP serta dapat mempengaruhi anggaran desa. Learning Forum (SMS) termotivasi untuk mendapatkan Swakelola tipe tiga. Mendengar PDA Kab. Serang mendapat swakelola tipe tiga, OMS di Kab. Serang khususnya learning forum terdorong untuk melakukan dan meningkatkan kapasitasnya sehingga dapat bekerjasama dengan pemda melalui skema swakelola tipe 3.



Workshop Formulasi Pendampingan Teknis Solusi Lokal kepada mitra Utama Madani hari pertama di Yogyakarta (24/05). Peserta yang terlibat dalam workshop tersebut ialah perwakilan dari 7 Mitra program Madani dari Kota Surakarta, Madiun, Kabupaten Sumenep, Sambas, Luwu Utara dan Sumedang. Doc. IDEA

ADVOKASI ANGGARAN WARGA UNTUK AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG INKLUSIF

Program advokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk perbaikan kualitas perencanaan penganggaran daerah. Adapun implementasi program ini dilaksanakan dengan strategi pendampingan dan asistensi teknis utamanya kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kalurahan, serta pendampingan dan advokasi kepada warga miskin dan kelompok rentan.

Dengan terselenggaranya program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis program/kegiatan yang masuk kategori *pro poor* maupun *pro gender* pada RKPD atau usulan perubahan program/kegiatan dalam rancangan RKPD.



Asistensi monitoring program penanggulangan kemiskinan kepada kelompok perempuan di Kalurahan Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo, DIY.

IMPLIKASI PROGRAM

Program ini dapat meningkatkan pemahaman kapasitas aparatur pemerintah tentang anggaran *pro poor* dan *pro gender*, sekaligus pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga. Disamping itu mereka juga mampu memanfaatkan data kemiskinan yang diperoleh melalui forum Musrenbang. Sebagai contoh, di Padukuhan Kroco, kalurahan Sendangsari Kabupaten Kulon Progo, kelompok mengangkat persoalan stunting sebagai prioritas yang perlu segera diselesaikan.

Warga juga memiliki dalam keterampilan dalam menganalisis anggaran daerah dan anggaran desa serta terlibat dalam proses perencanaan anggaran dengan menggunakandata kemiskinan yang sudah diverifikasi dan validasi. Catatan penting dalam proses advokasi adalah: 1). Satu data kemiskinan menjadi penting sebagai pijakan aksi penanggulangan kemiskinan, 2). Masyarakat sebagai aktor utama maka perlu diberikan ruang kontribusi, 3). Intervensi penanggulangan kemiskinan pada data mikro, dan 4). Pelibatan masyarakat dalam aktivitas kontrol kebijakan anggaran program penanggulangan kemiskinan. Program ini berimplikasi pada keadilan ekonomi bagi kelompok rentan. Validitas data kemiskinan menjamin kelompok rentan dalam mengakses berbagai program pengentasan kemiskinan pemerintah, dimana peluang tersebut menjadi jaminan akses kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi. Perubahan sosial yang tampak pada pemutakhiran data kemiskinan mengindikasikan kemauan perilaku inovatif dari para pemangku kebijakan untuk memampukan warganya yang tereksklusi.



Sanggar Sendratari dari Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo usai tampil dalam Forum Pembelajajaran Penanggulangan Kemiskinan di DIY bertajuk "Greget Desa" yang diselenggarakan IDEA.

PELIBATAN KOMUNITAS DALAM TRANSISI ENERGI BERKEADILAN MELALUI IMPLEMENTASI EITI DI INDONESIA

Sejak tahun 2010 Indonesia telah mengadopsi standar global atas pelaksanaan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau yang dikenal dengan *Extractive Industries Transparency Initiatives* (EITI). Pelaksanaan inisiatif ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif yang kemudian diubah melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuan adanya inisiatif EITI adalah untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Transisi energi merupakan pergeseran sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil ke energi bersih yang lebih ramah di lingkungan. Tujuan dari peralihan ini adalah untuk menekan risiko pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan di masa mendatang. Isu transisi energi tengah ramai digaungkan di tingkat global dan nasional bahkan menjadi prioritas isu yang diangkat dalam presidensi G20 Indonesia.

Transisi energi diharapkan membentuk masa depan negara-negara yang bergantung pada sumber daya, yang berdampak pada pendapatan pemerintah, keputusan investasi, dan pembangunan di tingkat lokal. Sementara beberapa daerah mungkin mendapat manfaat dari peningkatan investasi mineral strategis, yang lain mungkin menghadapi kerugian ekonomi di mana ada transisi dari produksi bahan bakar fosil. Transisi ke ekonomi rendah karbon akan berimplikasi pada ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi, serta pasokan mineral strategis, kunci dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan baterai listrik. Bagi masyarakat yang bergantung pada produksi bahan bakar fosil dan ekstraksi mineral, transisi energi akan berdampak pada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekstraktif, kesempatan kerja dan pengadaan lokal, serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan.

Belum lagi, persoalan dampak yang kian meluas hingga merugikan masyarakat khususnya penduduk yang tinggal berdekatan dengan wilayah operasi industri tersebut. Ragam implikasi dari pelaksanaan industri fosil sudah seharusnya menjadi pembelajaran dalam tata kelola energi di masa transisi. Untuk itu, diperlukan pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif baik dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat dalam mengawasi proses transisi dapat berjalan dengan baik dan minim risiko.

Indonesia sebetulnya sudah melakukan diversifikasi energi dengan

mengkombinasikan energi fosil dan energi bersih. Meskipun, dominasi supply energi fosil masih tinggi, namun pemerintah sudah mulai menaruh perhatian terhadap energi yang lebih ramah lingkungan. Selain energi terbarukan seperti air, surya, angin, pemerintah tengah mengembangkan energi listrik berbasis baterai. Dimana dalam pembuatannya membutuhkan nikel sebagai komponen pembentukannya. Kini Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri baterai di Morowali, Sulawesi Tengah yang sekaligus merupakan daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, tata kelola transisi energi perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka mempersiapkan proses peralihan energi di berbagai lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, perluasan informasi, peningkatan kapasitas, maupun akses informasi terkait perlu ditingkatkan. Diharapkan ragam pemangku kepentingan dapat mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sehingga akan lebih mampu menekan risiko dari transisi khususnya di tingkat lokal.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan mengawal transisi energi berkeadilan di Indonesia, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan IDEA Yogyakarta atas dukungan Sekretariat EITI Internasional menjalankan program "*Engaging Communities in a Just Transition through EITI Implementation*". Program ini untuk mendukung masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk lebih memahami, membahas, menangani, dan mempersiapkan dampak transisi energi di komunitas yang bergantung pada industri ekstraktif di daerah yang bergantung pada sumber daya. Program ini melakukan serangkaian diskusi, pelatihan dan pendampingan yang melibatkan langsung masyarakat desa Tiu, Maralee, Bungintimbe, Molores, dan Towara yang menghasilkan beberapa langkah strategis untuk advokasi.

Tujuan dari program ini adalah:
1. Memperkuat pengetahuan, kapasitas, dan kesadaran CSO terhadap dampak transisi energi dan industri ekstraktif serta pentingnya transisi energi berkeadilan di tingkat daerah.
2. Diseminasi dan tindak lanjut kajian "Pelibatan Masyarakat dalam Transisi Energi Berkeadilan melalui Implementasi EITI di Kabupaten Morowali Utara".
3. Memperkuat strategi jejaring CSO untuk merumuskan solusi bersama dalam memperbaiki tata kelola SDA dan mewujudkan transisi energi yang adil khususnya bagi masyarakat.
4. Merumuskan strategi advokasi pelembagaan EITI di daerah

IMPLIKASI PROGRAM

Isu Gender, pada sektor industri ekstraktif, khususnya industri penambangan Nikel dan pengolahan Nikel di Kabupaten Morowali Utara, perempuan lebih cenderung terlibat dalam kegiatan ekonomi informal seperti menjual makanan dan minuman untuk pekerja. Di Morowali Utara, kurang dari 6% anggota masyarakat yang bekerja di tambang nikel lokal adalah perempuan. Sifat informal perempuan tidak dipertimbangkan dalam rencana transisi energi, oleh karena itu data gender perlu *disclosure* data pilah gender (perempuan di sektor tenaga kerja industri ekstraktif baik formal maupun informal) untuk memitigasi dampak transisi energi bagi perempuan.

Pelibatan komunitas sekitar tambang, Pemangku kepentingan

menekankan perlunya informasi tentang persyaratan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dan persyaratan implementasi oleh perusahaan energi terbarukan, serta berwawasan ke depan terkait informasi rencana pengembangan proyek. Pemangku kepentingan menginginkan akses terhadap data lingkungan hidup memantau dampak operasi penambangan.

Akses dan informasi, terkait konsep transisi energi dan dampaknya, masyarakat di desa-desa tersebut hanya memahami bahwa maraknya eksploitasi pertambangan nikel dan tumbuhnya industri smelter di Morowali Utara, digunakan untuk bahan baku produk baterai. Masyarakat sekitar tambang belum banyak mengetahui berbagai regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan pertambangan sejak masa pra-tambang, pada saat aktivitas penambangan, dan pascatambang. Di sekitar lokasi penambangan belum terdapat informasi mengenai jenis bahan galian yang ditambang, luas wilayah penambangan, serta kapasitas atau volume bahan galian yang ditambang. Masyarakat belum banyak mengetahui potensi pertambangan dan energi terbarukan di wilayahnya.

Terkait informasi anggaran, baik peraturan terkait anggaran, mekanisme dan proses penganggaran, serta dokumen anggaran, belum banyak yang diketahui masyarakat. Masyarakat tidak tahu tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan .Providing detailed and timely information Memaksimalkan EITI sebagai platform transparansi dan akuntabilitas. .Transisi energi diperkirakan akan mengubah masa depan negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam, sehingga b.erdampak pada penerimaan negara, keputusan investasi, dan pembangunan di tingkat lokal. Meskipun beberapa wilayah dan daerah mungkin mendapat manfaat dari peningkatan investasi pada mineral strategis, wilayah lain mungkin menghadapi kerugian ekonomi ketika beralih dari produksi bahan bakar fosil. Transisi menuju ekonomi rendah karbon akan berdampak pada ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi dan pasokan mineral strategis yang sangat penting dalam meningkatkan energi terbarukan. Bagi masyarakat yang bergantung pada produksi bahan bakar fosil dan ekstraksi mineral, transisi energi akan berdampak pada penerimaan negara yang diperoleh dari kegiatan ekstraktif, lapangan kerja dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan.

Pemanfaatan dan informasi bagi masyarakat, berdasarkan diskusi dengan masyarakat mengenai cara meningkatkan transparansi dan tata kelola kegiatan pertambangan, masyarakat menyepakati beberapa hal berikut:

- Perlu adanya sosialisasi dan penjelasan mengenai aturan-aturan yang mendasari kegiatan pertambangan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di wilayahnya.
- Masyarakat berharap beberapa peraturan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten juga bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

- Perlu ada penjelasan mengenai keterkaitan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dengan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara untuk Desa.
- Perlunya informasi terkait izin untuk kejelasan/dan batas wilayah pertambangan
- Perlu adanya kejelasan mengenai izin lingkungan dan apa saja tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan serta bagaimana pelaksanaannya, khususnya dalam pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.
- Perlu adanya kejelasan dan transparansi mengenai tanggung jawab dan kewajiban sosial perusahaan serta program CSR kepada masyarakat agar tidak membingungkan dan menimbulkan konflik di tingkat masyarakat.
- Pemerintah Desa Tiu dan Maralee saat ini telah memiliki website desa yang diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi dan informasi bagi warga. Diharapkan website dapat berfungsi dengan data terkait di atas serta melalui website Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten.
-

Pentingnya membangun EITI di tingkat lokal, tidak ada satu pun masyarakat di desa-desa tersebut yang mengetahui tentang inisiatif EITI dan data serta informasi apa saja yang dihasilkan oleh EITI. Meski masyarakat di tingkat komunitas belum mengetahui tentang EITI, namun setelah mendapat penjelasan dari tim pelaksana Program, masyarakat terlihat sangat antusias mendukungnya. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi agar permasalahan dampak pertambangan yang saat ini mengancam ekosistem Danau Tiu yang menjadi sumber air, penghidupan dan penghidupan/pangan masyarakat dapat diselesaikan, terutama melalui mediasi melalui forum multipihak.

Program ini memiliki beberapa rencana tindak lanjut dan komitmen yang disepakati oleh para peserta, baik dari masyarakat, CSO, dan pemerintah daerah, beberapa peluang, seperti: Antusiasme yang tinggi untuk membentuk EITI di tingkat Lokal, khususnya di Kabupaten Morowali Utara. Inisiatif EITI diharapkan dapat menjadi jalan untuk mencari solusi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan pertambangan terkait berbagai permasalahan.

Dari sejumlah CSO di Sulawesi Tengah, berkomitmen untuk memperkuat jaringan untuk mengawal transisi energi, termasuk perlunya memperluas sosialisasi laporan EITI ke daerah-daerah, termasuk daerah sekitar tambang atau proyek energi terbarukan. Dari hasil pelatihan yang diikuti sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah, peserta menyampaikan akan mendiskusikannya dengan Pimpinan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membahas pembentukan EITI Lokal di Sulteng.

Beberapa peluang keterlibatan yang ada di tingkat lokal dapat digunakan untuk memperluas data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti: Memanfaatkan pertemuan masyarakat untuk dialog dan sosialisasi serta meningkatkan partisipasi aktif warga melalui pertemuan masyarakat

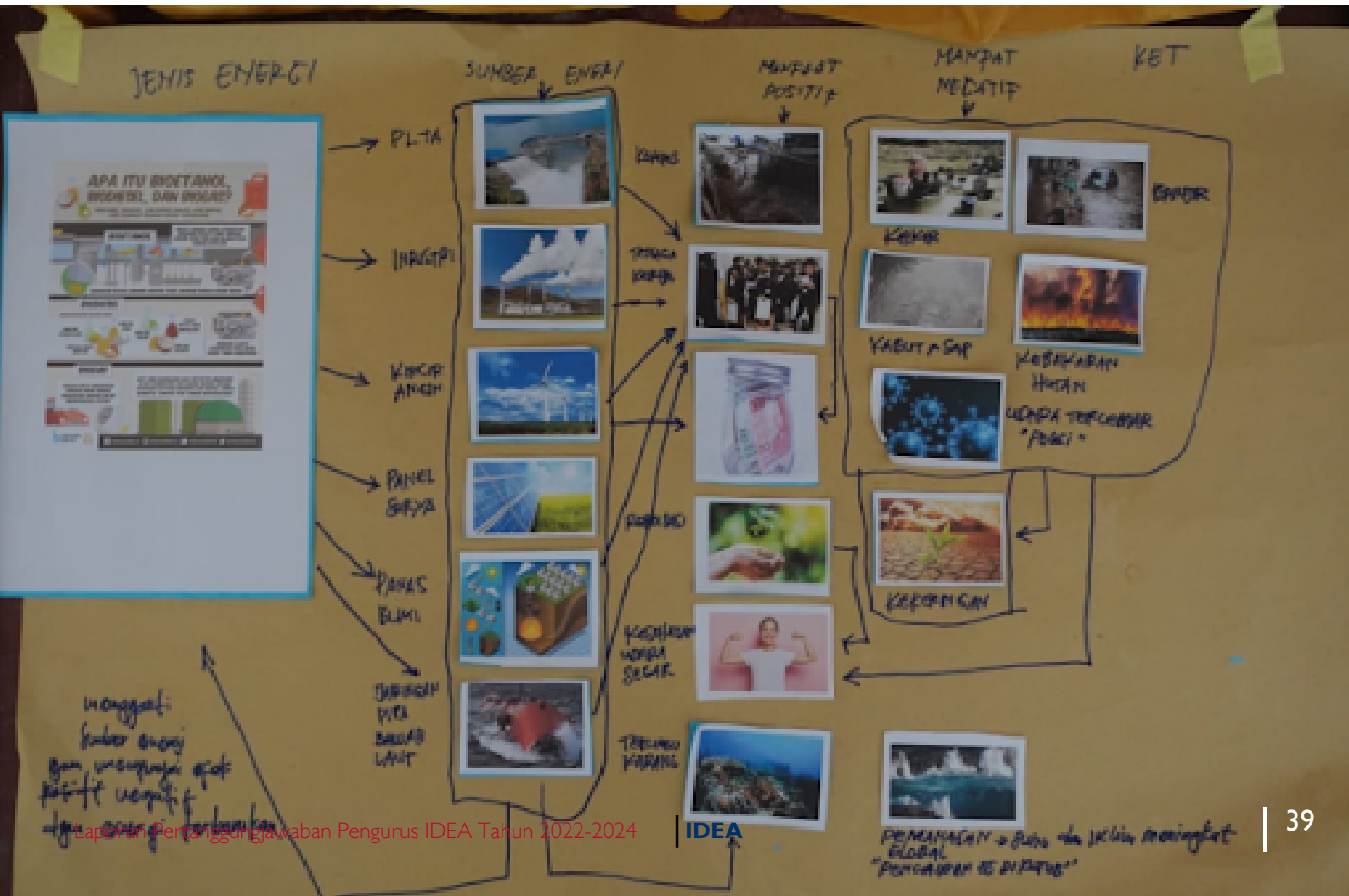
(pertemuan kelompok perempuan, kelompok pemuda desa, pertemuan dusun, pertemuan kelompok tani). Perlu memaksimalkan forum proses perencanaan desa dengan diskusi khusus isu pertambangan dan transisi energi (isu tematik).

Program ini juga memberikan beberapa rekomendasi:

- Bagi Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sebagai leading sector EITI Indonesia
- Perlunya sosialisasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam khususnya sektor pertambangan, sehingga daerah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pertambangan.

Sektor ini, terutama terkait dengan kebijakan terkait.

- Perlu dilakukan intensifikasi promosi terkait inisiatif EITI di tingkat daerah hingga tingkat kabupaten/kota dan desa agar masyarakat dapat turut serta mendorong implementasi seluruh rantai nilai EITI di tingkat daerah dan komunitas.
- Kementerian ESDM perlu mendorong dashboard fasilitas transparansi dan akuntabilitas evaluasi pelaksanaan komitmen EITI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Kementerian ESDM perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam mengatasi dampak pertambangan yang merusak lingkungan dan berdampak lebih lanjut terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang.



Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Morowali Utara)

- Pemerintah daerah harus mendukung pelembagaan EITI di Morowali Utara dalam proses persiapan transisi energi di tingkat daerah. Misalnya ketersediaan portal data sesuai rantai nilai industri ekstraktif, penyediaan informasi dana pertambangan, volume produksi, dan harga jual nikel, kobalt dan panas bumi, IUP, dana program CSR, dampak sosial ekonomi dan lingkungan, dampak lingkungan, analisis dampak.
- Perlu lebih sering diadakannya forum multipihak di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti;
- ombudsman lokal, komite transparansi lokal, jurnalis dan NGO lokal.

Untuk Pemerintah Daerah (Provinsi Sulawesi Tengah)

- Edukasi Energi Terbarukan bagi masyarakat sekitar Industri Pertambangan.
- Terdapat peta kebutuhan listrik on dan off grid di wilayah sekitar tambang
- Rencana pembangunan energi terbarukan untuk masyarakat (kerjasama dengan program CSR perusahaan).
- Mendorong prioritas pembangunan pembangkit listrik terbarukan untuk masyarakat (bukan perusahaan).
- Menyediakan data portal dan sosialisasi platform EITI dan laporan EITI di tingkat
- lokal.
- Memberikan hasil pemantauan dampak lingkungan secara berkala.
- Pemantauan cara mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang telah dilakukan.
- Contoh: stunting, krisis air bersih, ketahanan pangan.

Untuk CSO Lokal

- Partisipasi aktif melalui pertemuan masyarakat (pertemuan kelompok perempuan, pertemuan dusun, untuk diskusi khusus isu pertambangan dan transisi energi (masalah tematik)) dengan pemerintah daerah dan perusahaan.

Untuk perusahaan pertambangan dan smelter

- Dialog intensif dengan masyarakat sekitar industri pertambangan.
- Bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari pertambangan.
- Pengungkapan program dan alokasi anggaran CSR untuk masyarakat.

Program juga merekomendasikan perlu memberikan dukungan kepada MSG EITI Indonesia dalam memahami kebutuhan masyarakat lokal, peluang dan kemungkinan risiko seputar transisi energi melalui transparansi data dan informasi di tingkat sub-nasional berdasarkan studi kasus masyarakat di Kabupaten Morowali utara dan dukungan kepada komunitas lokal melalui peluang untuk melibatkan platform MSG EITI Indonesia untuk memperkuat suara komunitas demi perbaikan tata kelola energi dan sumber daya alam.

Sejumlah Isu penting juga perlu diadvokasi yaitu: mendorong perusahaan menerapkan good mining practices, mengembangkan kawasan lingkungan lestari, data pilah tenaga kerja perempuan yang bekerja di industri Nikel, perlindungan hak-hak pekerja perempuan (hak kesehatan, hak ketenagakerjaan, hak keselamatan kerja, dll) serta pengembangan peluang livelihood di sektor non pertambangan, terutama di sektor energi.

AGENDA PRIORITAS 3

MEMBANGUN WARGA SEBAGAI KOMUNITAS CERDAS YANG MEMAHAMI LOGIKA ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK, AKTIF TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN DAN AKTIF MENGAKSES INFORMASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK TERMASUK DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DARING.

PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK MENDUKUNG DESA MANDIRI BUDAYA

Dalam upaya penguatan sekaligus percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan desa, IDEA bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Pemda DIY melakukan pendampingan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 10 desa mandiri budaya DIY yaitu:

- **Kabupaten Bantul**: Kalurahan Sabbodadi, Bangunjiwo, Timbulharjo.
- **Kabupaten Gunungkidul**: Kalurahan Giring dan Bejiharjo.
- **Kabupaten Kulon Progo**: Glagah, Tuksono, Hargomulyo, Banjarharjo, Tanjungharjo, dan Sukoreno.
- **Kabupaten Sleman**: Kalurahan Sendangmulyo.

Implementasi program diawali dengan kegiatan training untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman aktor-aktor kunci Pemerintah Desa dalam kaitan implementasi PUG maupun PPRG dengan menggunakan instrumen analisis gender - akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Selain itu, data pembuka wawasan juga menjadi materi dalam pelatihan maupun pendampingan dan coaching clinic. Selanjutnya dilakukan telaah perencanaan dan penganggaran kalurahan untuk mengidentifikasi kapasitas anggaran responsif gender pada setiap kalurahan. Pada tahapan terakhir dilakukan coaching clinic kepada aktor-aktor kunci, diantaranya: Lurah, Carik, Kamituwa, Pangripta, hingga Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Desa Mandiri Budaya diatur dalam Pergub DIY nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, yang dimaksud Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah Desa/Kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan.

masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan dan ketentraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an. Dalam pasal 3 Peraturan Gubernur DIY nomor 93 tahun 2020 bahwa Desa Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. IDEA terlibat dalam sinergi dan harmonisasi program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya yang responsif gender.

IMPLIKASI PROGRAM

Kegiatan pendampingan PPRG menghasilkan program-program, kegiatan dan anggaran di kalurahan yang responsif gender untuk tahun anggaran 2023. tentang PUG dan Rencana Aksi Kalurahan terkait pelaksanaan PUG-PPRG. Setiap kalurahan program kegiatan diarahkan diarahkan untuk mendukung penguatan kelembagaan PUG di kalurahan dan program yang spesifik gender untuk kelompok rentan (perempuan kepala keluarga difabel, anak, lansia, warga miskin).

Pasca implementasi proses pendampingan kebermanfaatan utamanya diharapkan dapat diterima oleh aktor-aktor kunci kalurahan. Penguatan komitmen mereka dalam mengakomodasi PPRG dengan pengalokasian anggaran menjadi arah perubahan program pendampingan ini. Di dalam aspek kesejahteraan, program pendampingan ini berimplikasi pada terakomodasinya keadilan sosial khususnya tindakan afirmatif penyelenggara negara dalam memberikan jaminan hak dasar bagi kelompok rentan.



MENUJU SP4N LAPOR! YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengembangkan strategi nasional yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya penyediaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem SP4N-LAPOR!. Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, KemenPAN-RAB telah menyusun Roadmap SP4N- LAPOR! yang menjadi landasan hukum pelaksanaan SP4N-LAPOR! oleh pemerintah daerah dan pedoman bagi pejabat daerah untuk menyusun prioritas kebijakan dan anggaran daerah dalam pelaksanaan SP4N-LAPOR!, termasuk bagaimana mengimplementasikan gender dan inklusi sosial di dalamnya, sehingga layanan aduan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas tanpa terkecuali.

Namun demikian, Laporan Survei Kepuasan Publik Tahun 2020 yang dilakukan oleh UNDP mengidentifikasi hanya 1,5 persen dari total responden adalah penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam penggunaan SP4N-LAPOR!. KemenPANRB bersama dengan UNDP telah melakukan kegiatan *Online Focus Group Discussion* (FGD) Bersama dengan Pemerintah Daerah Menuju SP4N-LAPOR! yang Inklusif bagi Disabilitas pada 26 Oktober 2021. Kegiatan ini melibatkan organisasi penyandang disabilitas nasional dan lokal, pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, sejumlah rekomendasi pada aspek kebijakan, aksesibilitas dan partisipasi, sumber daya manusia, dan sistem telah dirumuskan bersama. Berikut ini rumusan rekomendasinya

1.Partisipasi

Tantangan dalam partisipasi adalah informasi mengenai SP4N-LAPOR! yang belum diketahui oleh mayoritas penyandang disabilitas. Disamping itu rendahnya kepercayaan terhadap layanan aduan SP4N-LAPOR! juga menjadi tantangan tersendiri. Kelompok penyandang disabilitas merasa ragu dan takut apabila aduannya tidak mendapatkan respon dari pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas atas SP4N-LAPOR!, Pemerintah pusat dan daerah diharapkan peningkatan cakupan sosialisasi kepada kelompok difabelnya, keluarganya dan sekolah-sekolah termasuk Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menggandeng *influencer* dari masing-masing ragam disabilitas.

Pada saat yang sama, pemerintah juga wajib memperluas jejaring dengan organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil lainnya dan organisasi massa untuk proses sosialisasi, pendampingan dan edukasi. Apalagi KemenPAN-RB telah menyiapkan pedoman sosialisasi SP4N-LAPOR! termasuk untuk penyandang disabilitas.

2. Aksesibilitas

Kelompok penyandang disabilitas mengalami tantangan untuk mengakses layanan aduan SP4N LAPOR!, terutama untuk tuna netra dan tuna rungu. Sistem website dan aplikasi SP4N LAPOR! belum menyediakan layanan pengaduan dengan kategori difabel dan ragamnya. Website dan aplikasi hanya menggunakan bahasa tulisan untuk informasi dan laporan. Sistemnya juga belum mampu mengidentifikasi pelapor yang difabel.

Prakteknya, selama ini kelompok difabel menyampaikan aduan secara langsung kepada organ pemerintah daerah penyedia layanan atau melalui orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah wajib melibatkan kelompok difabel dengan ragam disabilitas dalam proses perumusan kebijakan dan sistem. Disamping itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan layanan aduan secara konvensional atau tatap muka langsung ke unit layanan dengan memastikan infrastruktur (sarana dan prasarana) tersedia bagi ragam disabilitas.

3. Sistem

Untuk memperluas aksesibilitas dan memperluas partisipasi penyandang disabilitas, website dan aplikasi SP4N-LAPOR! harus sesuai dengan ragam disabilitas sebagai berikut;

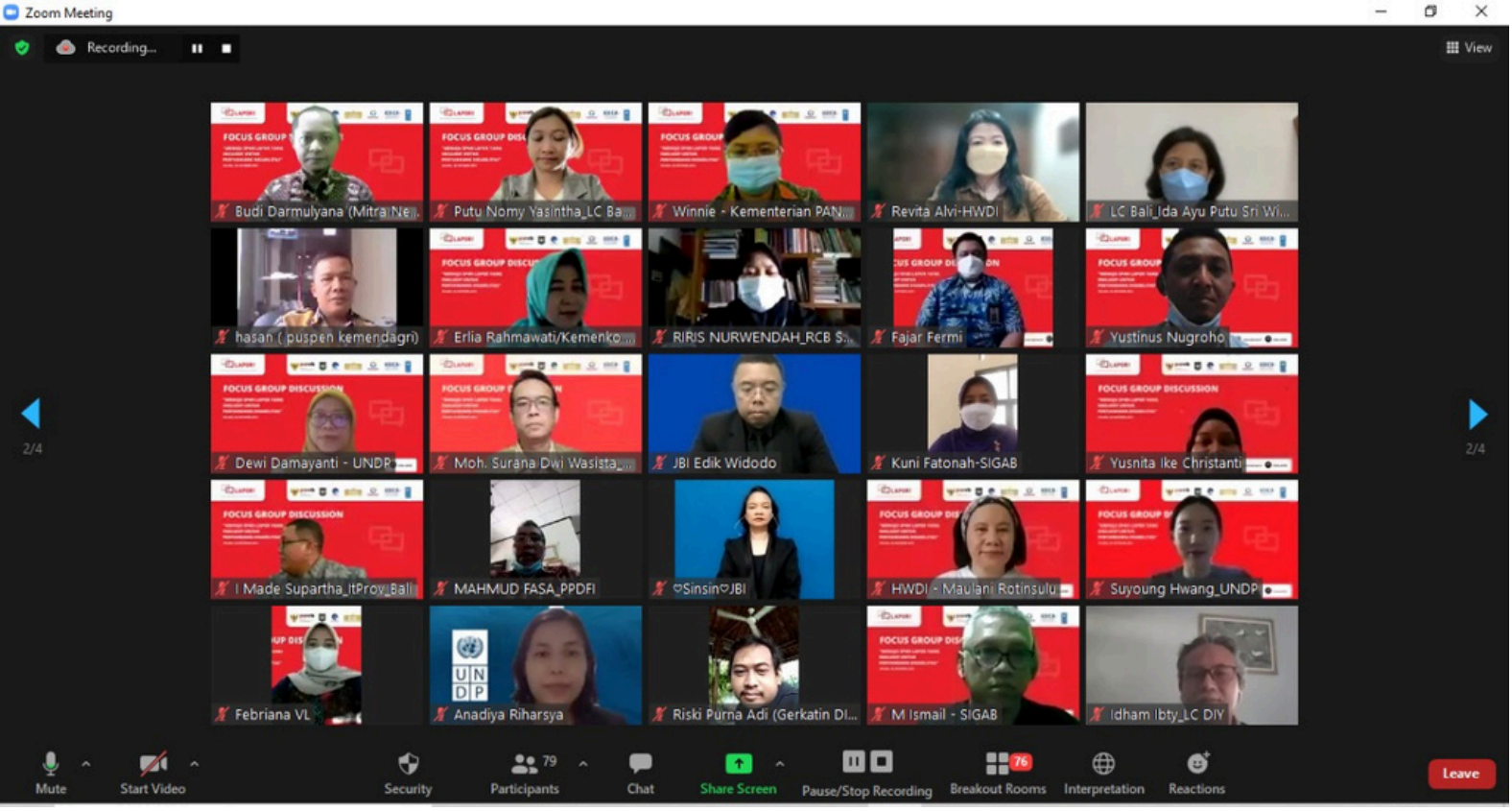
Kategori Difabel	Peningkatan Kualitas Fitur SP4N LAPOR!
Daksa	Bahasa yang sederhana dan mudah diingat
Rungu	• Bahasa yang sederhana dan mudah diingat • Konten dengan gambar dan teks
Netra	• Bahasa yang sederhana dan mudah diingat • *low vision mode* • *voice dan keyboard compatibility*

Selain itu, sistem juga wajib memuat tata kelola data aduan bagi disabilitas yang didalamnya memuat klasifikasi pelaporan bagi disabilitas dan ragam disabilitasnya, ragam informasi dan aduan yang dapat disampaikan serta durasi penanganannya. Untuk itu, perlu adanya SOP bagi pengelola SP4N-LAPOR! dan panduan penggunaan SP4N LAPOR! khusus disabilitas berdasarkan ragam disabilitas yang dapat digunakan oleh pengelola dan penyandang disabilitas.

4. Kebijakan

Pada level makro, pembangunan Komite Kerja Nasional beserta mekanisme kerjanya, wajib melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) dengan memberikan informasi tembusan dari 5 Kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SP4N LAPOR!, sehingga Kemenko PMK dapat melakukan koordinasi horisontal dan vertikal. Selanjutnya Pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional SP4N LAPOR! dengan menyusun dengan Rencana Aksi Daerah SP4N LAPOR! sebagai panduan pelaksanaan SP4N LAPOR! di daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu menyusun kebijakan untuk memayungi percepatan penggunaan SP4N LAPOR! sebagai kebijakan dan inovasi pelayanan publik berbasis pengaduan *(complaint-based public services policy)*.

Di level meso, perlunya penguatan kebijakan SP4N LAPOR! yang inklusif dan akuntabel, berupa panduan implementasi layanan pengaduan publik dan protap konsultasi publik difabel. Dan di level mikro, personil pengelola SP4N-LAPOR! di instansi ikut dalam proses peningkatan kompetensi, termasuk berpartisipasi aktif dalam



Focus Group Discussion (FGD) Menuju SPAN Lapor Yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan IDEA bersama UNDP. | Doc IDEA

platform pembelajaran SP4N untuk pengembangan konten; e-learning; coaching dan mentoring; community of practices. Untuk pembangunan fungsi pengelolaan pengaduan secara khusus dalam organisasi dan tata kerja instansi wajib didukung oleh anggaran untuk sumber daya manusia; untuk itu perlu regulasi mengenai hal tersebut. Dan pada level ini, pemantauan dan evaluasi pengelolaan SP4N di lingkungan instansi wajib dilakukan secara periodik paruh waktu dan tahunan sesuai untuk mendorong rekomendasi dan review survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

5. Sumber Daya Manusia

Untuk menampung aduan kelompok difabel dibutuhkan kapasitas SDM pengelola layanan aduan yang memiliki kapasitas melayani difabel di level kecamatan, kabupaten dan provinsi. Kebutuhan ini potensial diberikan kepada penyandang disabilitas.

Secara umum, tantangan dan peluang serta rekomendasi untuk peningkatan inklusifitas SP4N-LAPOR! sudah dapat dipetakan dalam kegiatan ini. Namun demikian, kegiatan ini belum secara spesifik menangkap tantangan partisipasi dan aksesibilitas bagi kelompok perempuan, pemuda dan manula penyandang disabilitas. Begitu pula dengan tantangan berdasarkan wilayah. Peta yang diperoleh masih dominan Jawa dan nasional. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan lagi pemetaan tantangan, peluang dan rekomendasi yang mencakup representasi wilayah, gender dan inklusi sosial secara merata.

MONITORING DAN EVALUASI SP4N LAPOR, LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

IDEA bekerjasama dengan UNDP melakukan monitoring dan evaluasi implementasi SP4N LAPOR di Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama monev ditemukan beberapa permasalahan dan upaya untuk mengatasinya. Beberapa permasalahan yang timbul antara lain: Respon dari Organisasi Perangkat Daerah terkait penanganan aduan masih lambat karena OPD kurang memahami tugas dan fungsinya serta keterbatasan resource atau sumber daya untuk melakukan tindak lanjut. Selain itu, kurangnya sosial sosialisasi dan edukasi masyarakat khususnya kelompok rentan (GESI) baik jumlahnya maupun kemitraan dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di masyarakat.

Dari proses monev terdapat kebutuhan pelembagaan dengan kejelasan unit kerja dengan struktur organisasi untuk penanganan pengaduan masyarakat dan perlu adanya integrasi antar kanal aduan e-LAPOR DIY dengan SP4N Lapor, termasuk kanal aduan dari media sosial. Dari sisi SDM, perlu peningkatan kapasitas SDM pengelola pengaduan pelayanan publik (Pelatihan/peningkatan skill bagi pengelola pengaduan pelayanan publik, pelayanan prima, tata bahasa menjawab aduan, pengolahan data, pemanfaatan data, dll).

Penting untuk mengupayakan Penguatan Simpul (Hub) Koordinasi SP4N-Lapor! Dengan Kabupaten Kota serta para stakeholder terkait, misalnya menguatkan forum peran serta para pemangku kepentingan. Masyarakat sangat bersemangat dengan berbagai hal yang terjadi di daerah.



FGD Rencana Aksi SP4N LAPOR Kabupaten Sleman tahun 2023 yang diselenggarakan IDEA, Kemenpanrb dengan dukungan UNDP. | Doc IDEA



Monitoring Rencana Aksi SP4N LAPOR DIY tahun 2023 yang diselenggarakan IDEA, Kemenpanrb dengan dukungan UNDP. | Doc IDEA

Secara keseluruhan, SP4N LAPOR! DIY terlaksana dengan baik di bawah koordinasi tim SP4N LAPOR! DIY yang dapat berhasil disatukan tata kelolanya dengan E-Lapor. Namun untuk utilisasi data Lapor pada setiap OPD untuk dapat didayagunakan bagi perbaikan layanan dan perencanaan program periode berikutnya masih perlu peningkatan kapasitas di setiap OPD-nya, harapannya aturan mainnya sudah baku. Dalam memaksimalkan SP4N LAPOR dapat diakses masyarakat untuk aduan dan mampu meningkatkan pelayanan publik, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, sosialisasi ke masyarakat perlu lebih ditingkatkan dalam bentuk forum multi stakeholder dengan melibatkan akademisi, media massa dan LSM terkait (DIY punya istilah penta helix). Inisiatif untuk menjangkau komunitas *GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)* secara lebih luas perlu ditingkatkan kemitraan dengan Organisasi Komunitas GEDSI.

AGENDA PRIORITAS 4

PENGUATAN DEMOKRASI DALAM PEMILU 2024

MENCETAK PEMILIH MUDA BERINTEGRITAS DI INDONESIA

Rencana strategi IDEA dalam agenda prioritas keempat adalah Penguatan Demokrasi dalam Pemilu 2024. Program memperkuat memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik uang yang dijalankan IDEA adalah program kerjasama antara Perkumpulan IDEA dengan kemitraan. Program ini menekankan pentingnya integritas pemilih di kalangan orang muda dan ketahanan terhadap politik uang terutama menjelang pemilihan kepala daerah Tahun 2024. Selain itu, orang muda juga diharapkan dapat mengawal hasil pilkada sehingga pelayanan publik dapat memenuhi hak warga dan tidak ada penyimpangan, korupsi dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Program ini dilaksanakan di 5 provinsi yaitu:Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa TImur, Sumatera Utara dan Daerah Khusus Jakarta

Program ini melalui tiga tahap yaitu pertama penyusunan modul ToT integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik uang untuk pemilih muda, pelaksanaan ToT, Training kepada end user oleh alumni ToT. ToT diikuti oleh sekitar 100 orang muda, dan sampai dengan akhir tahun 2024 telah mengedukasi ribuan end user di 5 daerah baik secara tatap muka maupun secara digital melalui media sosial.

IMPLIKASI PROGRAM

Program "Voter Integrity" berhasil meningkatkan kesadaran pemilih muda tentang prinsip-prinsip kewargaan yang meliputi hak dan kewajiban warga negara, termasuk dalam konteks terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan Pilkada tahun 2024. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan dan ketahanan pemilih muda terhadap korupsi, konflik kepentingan dan politik uang, termasuk hubungan ketiganya dengan pemilu dan Pilkada tahun 2024. Pemilih muda juga meningkat skill atau keterampilan untuk menjadi influencer yang memiliki ketahanan terhadap politik uang dan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk turut menolak politik uang. Program ini melibatkan influencer muda dari pemimpin.id dan WIUI. Program ini berhasil mendorong peserta untuk lebih aktif dalam mengedukasi orang-orang di sekitarnya tentang prinsip menolak politik uang.. Hal tersebut terlihat dari kemampuan peserta untuk memproduksi dan mempublish konten ajakan menolak politik uang dan mengawal pilkada yang berintegritas.



Training of Trainers Kepada Orang Muda di Jawa Timur yang diselenggarakan IDEA bersama Kemitraan dalam program USAID INTEGRITAS | Doc IDEA

Modul "Voter Integrity" yang dimiliki IDEA disusun sebagai bahan ajar pelatihan atau edukasi untuk melawan praktik politik uang yang marak terjadi dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Politik uang seringkali berujung pada mahalnya biaya politik dan berpotensi mendorong politisi untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka setelah terpilih. Kondisi ini merugikan demokrasi Indonesia, terutama dengan jumlah pemilih pemula yang cukup besar pada Pemilu dan Pilkada 2024. Modul ini dirancang untuk melatih fasilitator, komunitas, dan influencer agar mampu mengembangkan kapasitas pemilih, terutama pemilih muda, dalam memahami pentingnya integritas dalam pemilu. Fokus utamanya adalah membangun ketahanan terhadap politik uang melalui pendidikan kewarganegaraan, strategi komunikasi, dan pemetaan calon kepala daerah yang berintegritas.Selain itu, modul juga dilengkapi dengan panduan praktis untuk kampanye anti-politik uang dan instrumen pemantauan integritas pemilih, yang bisa diadaptasi sesuai kebutuhan lokal. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar tentang republik dan kewarganegaraan, korupsi, konflik kepentingan, hingga strategi menjadi influencer dalam menyebarkan nilai-nilai integritas di masyarakat.

Secara khusus, ada beberapa keunggulan dari modul berdasarkan hasil workshop penyempurnaan dan input dari peserta ToT, yaitu:

- Struktur yang Jelas dan Komprehensif, Modul memiliki struktur yang cukup teratur dan menyeluruh. Bab-babnya mencakup konsep dasar yang relevan, mulai dari pengertian republik dan kewarganegaraan hingga strategi kampanye melawan politik uang. Dengan panduan langkah demi langkah, modul ini memudahkan fasilitator dalam memberikan pelatihan..

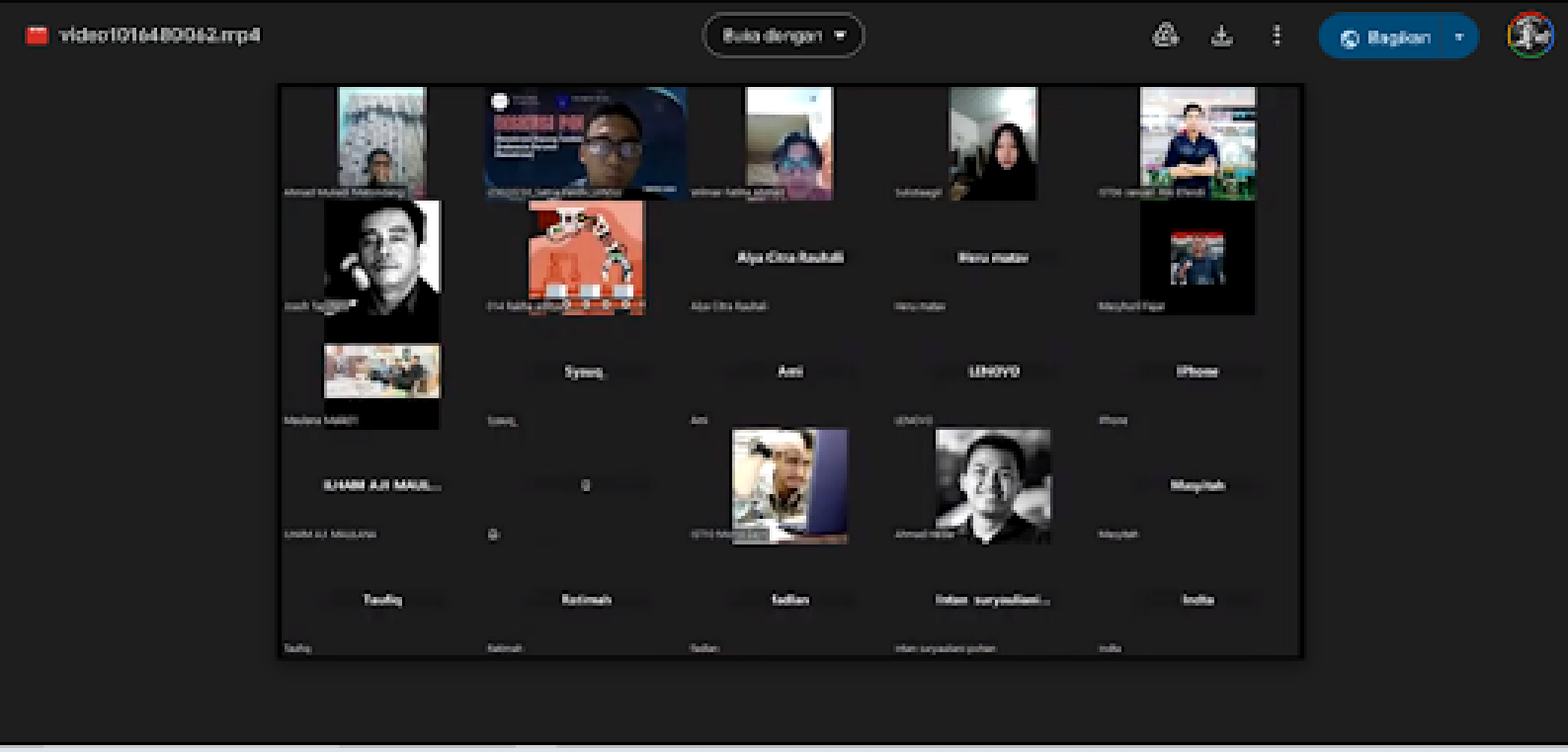
- Relevansi Terhadap Kondisi Sosial dan Politik Terkini, Modul relevan dengan masalah mendesak dalam konteks Pemilu dan Pilkada di Indonesia, terutama menyangkut masalah politik uang yang sering kali dianggap sebagai hal normal oleh masyarakat. Fokus pada pemilih muda, khususnya Generasi Z, yang jumlahnya cukup signifikan dalam Pemilu 2024, menambah nilai strategis modul ini dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.
- Metode Pelatihan yang Variatif dan Interaktif, Modul Memanfaatkan berbagai metode, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan role-playing, yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dari peserta. Metode ini juga memungkinkan peserta untuk lebih memahami materi secara praktis dan aplikatif, tidak hanya secara teoritis

Sesuai fokus sasaran dari program ini, selama implementasi kegiatan, peserta yang terlibat mayoritas adalah orang muda, baik sejak penyusunan modul hingga implementasi ToT maupun tindak lanjut setelah ToT. Keterlibatan orang muda dari 5 Provinsi sekitar 74% dengan range usia 17-30 tahun. Sementara peserta yang berusia lebih dari 30 tahun sebanyak 26%.

Setelah mengikuti Training of Trainers (ToT), para peserta menyadari pentingnya mengedukasi pemilih muda di komunitasnya tentang prinsip anti-politik uang. Kesadaran ini muncul karena mereka memahami bahwa politik uang merusak integritas demokrasi dan mengancam masa depan yang adil. Dengan bekal pengetahuan dari pelatihan, peserta merasa lebih siap untuk menyampaikan pesan bahwa memilih pemimpin tidak boleh didasarkan pada uang atau imbalan, melainkan pada kualitas, visi, dan integritas calon. Mereka juga ingin mendorong pemilih muda agar lebih kritis dan tidak tergiur oleh tawaran materi dalam proses pemilihan, serta memahami dampak buruk jangka panjang dari praktik politik uang terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan monitoring yang dilakukan, setidaknya ada dua peserta dari dua provinsi yang memiliki inisiatif untuk memberikan edukasi melalui forum diskusi dan dialog kepada teman-teman dan lingkungan terdekat mereka.

Dialog interaktif ”Menakar Kesiapan Pilkada Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan 2024”

Kegiatan ini dilakukan oleh alumni ToT bernama Afdhal pada 16 Agustus 2024. Ia bersama organisasi tempat dirinya beraktivitas yaitu Liga Mahasiswa dan Pemuda Kab. Wajo (LDPW) menyelenggarakan dialog interaktif dengan melibatkan sebanyak 30 mahasiswa, siswa SMA, dan pemuda di wilayah Kabupaten Wajo. Dalam dialog ini, setidaknya ada 3 tujuan yang ingin disampaikan, pertama, meningkatkan kesadaran politik pemuda untuk memahami hak-hak politik, proses pemilu yang demokratis, serta kemampuan memilih calon yang berintegritas. Kedua, meningkatkan partisipasi pemilih agar pemilih muda dapat memberikan suaranya saat pilkada berlangsung, dan yang ketiga mendiskusikan isu dan tantangan dalam pilkada, khususnya terkait pelanggaran pilkada seperti politik uang.



Dialog Politik Demokrasi di Ujung Tanduk: Indonesia Darurat Demokrasi di Sumatera Utara

Dua orang alumni ToT bernama Satria dan Ahmad dari ruang literasi Sumut menyelenggarakan dialog politik bertajuk Demokrasi di Ujung Tanduk, Indonesia Darurat demokrasi. Kegiatan yang diikuti 25 pemuda ruang literasi tersebut diselenggarakan pada 26 Agustus 2024 melalui zoom meeting.

Forum tersebut menurut Satria bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dan penyadaran anti politik uang kepada kawan-kawannya sesama pemuda di ruang literasi. Ia ingin materi yang didapatkan saat mengikuti ToT juga dapat dibagikan kepada orang-orang di dekatnya.



Workshop dan Deklarasi Orang Muda di Tuban, Gresik dan Lamongan Menolak Politik Uang di Pilkada 2024

3 Alumni ToT dari Kabupaten Lamongan, Gresik dan Tuban menyelenggarakan workshop dan deklarasi orang muda menolak politik uang di Pilkada 2024. Mereka melibatkan perwakilan komunitas orang muda seperti karaeng taruna, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa hingga pengawas pemilu untuk bersama-sama menyusun strategi dan deklarasi penolakan terhadap politik uang saat proses pelakasanaan Pilkada 2024 di masing-masing wilayah.



One on One Campaign Menolak Politik Uang Kepada Kelompok Perempuan di Medan

Pada tanggal 9 November lalu, Alumni Training of Trainers (ToT) yang terdiri dari Andre, Satria, Ahmad, dan Yessica melaksanakan kegiatan kampanye personal atau one-on-one campaign kepada kelompok perempuan di Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan, mengenai bahaya politik uang dan pentingnya menolak praktik tersebut dalam proses demokrasi.

Dalam pelaksanaannya, mereka menggunakan pendekatan personal dengan berbicara langsung kepada individu maupun kelompok kecil perempuan. Melalui diskusi interaktif, mereka menyampaikan pemahaman mengenai dampak negatif politik uang terhadap demokrasi, sekaligus mengajak peserta untuk lebih kritis dalam menghadapi tawaran-tawaran yang dapat merusak integritas pemilu.

Dari hasil kegiatan ini, tampak adanya peningkatan kesadaran di kalangan peserta tentang bahaya politik uang. Beberapa di antaranya bahkan menyatakan komitmennya untuk tidak menerima atau terlibat dalam praktik semacam itu pada pemilu mendatang. Umpan balik positif juga diterima dari peserta yang merasa lebih memahami isu ini setelah mengikuti sesi edukasi.

Edukasi dan Deklarasi Menolak Politik Uang oleh Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Pada tanggal 23 November 2024, Musfirah, seorang Alumni Training of Trainers (ToT) sekaligus penyandang disabilitas, melaksanakan kegiatan edukasi kepada sekitar 80 orang penyandang disabilitas di Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kelompok disabilitas agar mampu menolak praktik politik uang dalam proses demokrasi.

Dalam sesi edukasi, Musfirah menyampaikan bahwa kelompok disabilitas sering kali menjadi sasaran empuk bagi operator politik atau tim sukses calon karena dianggap sebagai kelompok yang rentan dan mudah dipengaruhi. Kondisi ini membuat mereka lebih berisiko terjerumus dalam praktik politik uang, baik dalam bentuk pemberian uang tunai maupun bantuan lain yang disertai dengan tuntutan dukungan politik.

Oleh karena itu, menurutnya, sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai bahaya politik uang serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

Melalui pendekatan yang inklusif dan komunikatif, Musfirah menjelaskan bagaimana politik uang dapat merusak sistem politik yang seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga membagikan strategi praktis agar para peserta mampu mengenali modus-modus politik uang serta berani menolak dan melaporkan jika menemui praktik tersebut. Selain itu, ia mendorong para penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dan memilih calon pemimpin berdasarkan rekam jejak serta program yang mereka tawarkan, bukan berdasarkan iming-iming materi.





BAB III
PENGELOLAAN PENGETAHUAN IDEA



AGENDA PRIORITAS 6

PENGUATAN PENGGALANGAN SUMBERDAYA



Pembelajaran bersama antara IDEA, Yappika dan Manka Foundation tentang tata kelola organisasi masyarakat sipi | Doc IDEA, 2025.

Rencana strategis IDEA Tahun 2022-2027 memandatkan IDEA harus memiliki strategi dan panduan penggalangan sumber daya (resource mobilization), termasuk sumber dana, sumber daya manusia (relawan) dan jaringan sebagai upaya berkesinambungan mencapai visi IDEA. Kedepan IDEA akan mengambil peran Co-Management (manajemen bersama) dengan membentuk kelompok-kelompok kolaboratif dalam forum multi stakeholder untuk mewadahi kepentingan semua pihak terutama masyarakat rentan. Agenda tersebut pada kurun waktu tahun 2022-2024 diupayakan dengan Peningkatan kerja sama dan mobilisasi sumber daya dengan pihak luar dengan mendorong Kerja sama dengan para pihak untuk mewadahi kepentingan semua pihak, terutama warga terdampak.

KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

Kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta diawali dengan penandatanganan MoU antara IDEA dengan Universitas AMIKOM Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2022. Ruang lingkup kerjasama meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang mahasiswa. Tindak lanjut setelah MoU adalah menjadi Dosen tamu mata kuliah advokasi sosial yang diisi oleh Ahmad Hedar. Selain itu, kegiatan magang mahasiswa Pengiriman mahasiswa magang AMIKOM ke komunitas Pinilih untuk pendampingan pembuatan marketplace ramah disabilitas.

Kerjasama dengan Universitas Teknologi Yogyakarta diawali dengan penandatanganan Mou antara IDEA dan UTY pada tanggal 10 April 2023. Ruang lingkup kerjasama meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang mahasiswa, kuliah umum/seminar/workshop, job recruitment dan bidang lain yang disepakati kedua belah pihak.

Kerjasama dengan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh diawali dengan penandatanganan MoU pada tanggal 29 - Maret 2022. Ruang lingkup kerjasama meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang mahasiswa.. Kerjasama dengan Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada belum ada perjanjian kerjasama secara formal, namun beberapa aktivitas sudah dilakukan yaitu: menjadi Dosen tamu mata kuliah Politik Keuangan Daerah program S1 dan S2 pada bulan Juni 2024 oleh Tenti Novari Kurniawati dan Ahmad Hedar, Pengiriman mahasiswa Magang S2 Mahidol University yang sedang menempuh studi di Program Magister Departemen Politik Pemerintahan UGM ke IDEA, serta dosen UGM terlibat dalam penyusunan modul Voter Integrity.

Program ini melalui tiga tahap yaitu pertama penyusunan modul ToT integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik uang untuk pemilih muda, pelaksanaan ToT, Training kepada end user oleh alumni ToT. ToT diikuti oleh sekitar 100 orang muda, dan sampai dengan akhir tahun 2024 telah mengedukasi ribuan end user di 5 daerah baik secara tatap muka maupun secara digital melalui media sosial.



PENGEMBANGAN UNIT USAHA ANALITIKA INDONESIA KONSULTAN (AIK)

Sejak Unit Usaha ini didirikan Tahun 2015, AIK telah melayani lebih dari 150 jenis kegiatan dengan layanan berupa jasa riset baseline, monev program, assessment, penyusunan kajian kebijakan, pembuatan modul, fasilitator pelatihan dan lain sebagainya. Jenis isu yang dilayani adalah isu desa, kebijakan perencanaan dan penganggaran, pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, industri ekstraktif, energi terbarukan, Pengarusutamaan GEDSI, pemberdayaan masyarakat, penguatan organisasi, manajemen organisasi dan keuangan, dan isu yang relevan.

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

Jaringan Global

- IBP (International Budget Partnership)
- PWYP (Publish What You Pay) Global
- OGP (Open Government Partnership)

Jaringan Nasional

- PWYP (Publish What You Pay) Indonesia-Anggota dan Badan Pengarah serta wakil CSO EITI Tahun 2022-2025.
- FOINI (Freedom of Information Network Indonesia)-Anggota
- INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)-Anggota
- JMK (Jejaring Mitra Kemanusiaan)-Koordinator Pilar 3
- PLANAS PRB (Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana)
- KMSTP (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan)-Anggota
- MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik)-Anggota
- LOKADAYA-Anggota

Jaringan Lokal

- Forum LSM DIY- Dewan Pengawas
- Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) DIY-Anggota dan Pengurus Divisi Pengelolaan Pengetahuan
- AMPPY (Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta)-anggota
- SONJO (Sambatan Jogja)-anggota
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY-anggota pokja Pemberdayaan masyarakat
- Tim Ketahanan Ekonomi DIY-anggota pokja.

AGENDA PRIORITAS 7

PENINGKATAN LAYANAN IDEA SEBAGAI PENYEDIA INFORMASI DAN PRODUK PENGETAHUAN UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM DAN ADVOKASI

Pencapaian agenda prioritas 7 dilakukan dengan strategi Mendukung proses advokasi dan dialog dengan penyediaan informasi dalam berbagai bentuk sesuai target penerimanya, mendorong penyebaran informasi yang ramah, mudah diakses dan digunakan bagi kelompok sasaran, tersedianya sistem pengelolaan pengetahuan (pengumpulan, analisis dan distribusi) dan tersedianya sistem monitoring penggunaannya. Selain itu, penggunaan pengetahuan dari IDEA untuk pengembangan program dan advokasi oleh IDEA maupun pihak lain juga sudah dilaksanakan dan menyediakan layanan yang lebih luas dengan inovasi pemanfaatan teknologi (digital).

Usia IDEA yang sudah cukup matang menjadikan posisi IDEA sebagai organisasi masyarakat sipil yang cukup kuat diakui oleh para mitra dan pemangku kepentingan. Salah satu topik yang sering menjadi pembahasan di komunitas dan jaringan masyarakat sipil di DIY adalah minimnya pengawasan publik atas penggunaan dana keistimewaan DIY. Dengan demikian, eksistensi IDEA sebagai aktor yang berperan mengawasi penggunaan danais diapresiasi oleh banyak pihak. Minimnya pengawasan dari publik dan diskusi maupun debat publik penggunaan danais DIY berdampak tingginya minat publik untuk berdiskusi dan membahas efektivitas penggunaan danais. Ke depan, diharapkan semakin banyak ruang-ruang diskusi dan model-model pengawasan penggunaan danais yang melibatkan masyarakat dan mendapatkan respon cepat dari pemerintah DIY dan para pengambil kebijakan lainnya.



IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAERAH DENGAN OTONOMI KHUSUS-KEISTIMEWAAN DI INDONESIA

Implikasi dari kebijakan otonomi khusus dan keistimewaan adalah bertambahnya alokasi anggaran yang diberikan untuk mendukung implementasi otonomi sesuai bidang masing-masing. Artinya, selain memiliki anggaran pendapatan tetap melalui alokasi dana APBD, daerah dengan otonomi khusus juga mendapatkan alokasi tambahan yang didapat dari pemerintah pusat sebagai bagian dari dukungan kebijakan otonomi khusus. Hal tersebut terjadi di Provinsi DIY, Aceh dan Papua.

Stimulus anggaran memang memberikan manfaat untuk mengembangkan program sesuai dengan kekhususan di tiga daerah tersebut. Namun, di sisi lain, adanya sumber pendanaan baru yang secara nilai cukup besar, juga meningkatkan potensi penyalahgunaan. Hal tersebut seperti menjerat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sebagai tersangka kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran ialah keterbukaan informasi atau transparansi. Keterbukaan informasi dapat membuka akses publik untuk memantau secara langsung penggunaan anggaran daerah, termasuk anggaran otonomi khusus. Oleh karena itu, IDEA berupaya melakukan kajian untuk memotret bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di daerah dengan otonomi khusus, sebagaimana mandat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik di daerah dengan otonomi khusus, dapat mengunjungi website IDEA.



28 TAHUN IDEA: TERUS BERGERAK UNTUK UPAYA PEMENUHAN HAK RAKYAT

Advokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi DIY menjadi bagian dari program strategis IDEA, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut mengingat kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi DIY yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam rangka memperingati ulang Tahun IDEA yang ke 27, pada tahun 2024 diadakan Diskusi bertajuk "Pemanfaatan Danais untuk penanggulangan Kemiskinan di DIY" dipantik oleh Kepala Bidang Sabermas Bappeda DIY, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Paniradya Keistimewaan DIY, serta direktur IDEA Yogyakarta di Kampoeng Mataraman, Panggungharjo, Bantul, pada Jumat (19/05).

Dalam sarasehan tersebut, IDEA menghadirkan jejaring organisasi masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang selama ini menjadi mitra. Dari unsur masyarakat, kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas dari seluruh wilayah provinsi DIY, kemudian ada Bappeda Provinsi dan Kabupaten di DIY, dan beberapa pemerintah desa seperti kepala desa Panggungharjo Bantul dan Sendangsari Kulon Progo, serta dari organisasi masyarakat sipil seperti Yasanti, Rifka Annisa, LKIS, Forum LSM, dan forum PRB DIY.

Pada tahun 2023, menurut data BPS, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 11,49 persen. angka tersebut mengalami kenaikan 0,15 persen dibandingkan Maret 2022. Angka tersebut sekaligus menjadikan DIY sebagai Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Jawa dan masuk dalam jajaran Provinsi yang garis kemiskinannya di atas rata-rata nasional. Dari sisi sebaran, mayoritas penduduk miskin berada di desa dengan persentase sebesar 14%. Sementara sebaran di perkotaan sebesar 10,64%. Selain soal kemiskinan, yang lebih memprihatinkan lagi ialah terkait gini ratio DIY yang berada pada angka 0,459, angka tersebut berada di atas angka gini nasional dan sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia, dengan kata lain, Provinsi DIY menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi secara nasional.

Pemanfaatan danais untuk penanggulangan kemiskinan diharapkan berkontribusi terhadap percepatan penanganan kemiskinan. Karena, intervensi program dan anggaran DIY selama ini tidak secara signifikan menekan angka kemiskinan, dengan kata lain penurunan angka kemiskinan di DIY mengalami perlambatan. Pada tahun 2022, alokasi danais untuk penanggulangan kemiskinan sejumlah Rp.29,5 Miliar hal tersebut dialokasikan untuk program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dari sisi persentase, angka tersebut terbilang sangat kecil, yaitu hanya 2%



Syawalan dan sarasehan 28 tahun IDEA bertajuk "Pemanfaatan Danais untuk penanggulangan Kemiskinan di DIY", Panggungharjo, Bantul, Jumat (19/05). Doc. IDEA

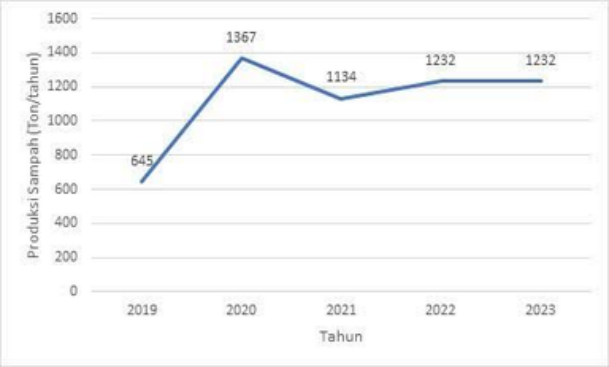
dari seluruh alokasi danais yang pada tahun 2022 mencapai 1,3 triliun. Ini sekaligus menjadi catatan agar ke depan, alokasi untuk penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan persentase alokasi danais pada tahun 2022 masing-masing dialokasikan untuk urusan Kebudayaan sebesar 55,43 persen, tata ruang 39,99 persen, kelembagaan 2,68 persen dan pertanahan 1,90 persen. Catatan lain tentang implementasi tata kelola danais ialah terkait keterbukaan informasi yang masih rendah, data danais sulit diakses secara mudah oleh masyarakat, sehingga pengawasannya juga menjadi lemah. Menurut hasil monev Komisi Informasi Daerah, Paniradya Keistimewaan sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengelola kebijakan, program dan anggaran keistimewaan mendapatkan nilai merah, yang artinya tidak informatif.

Dari sisi partisipasi, perencanaan alokasi danais perlu memperhatikan keterlibatan kelompok masyarakat untuk memastikan program dan anggaran yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelompok yang perlu menjadi prioritas, terutama ialah warga miskin dan warga rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan perempuan. Terakhir, dari sisi sebaran pemanfaatan. Program danais diharapkan tidak hanya dialokasikan di daerah perkotaan saja, melainkan justru di daerah pedesaan, terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan di DIY seperti kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Hal ini dilakukan untuk menekan disparitas kemiskinan pedesaan dengan perkotaan.

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA YOGYAKARTA

Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta masih menjadi persoalan krusial dari tahun ke tahun. Tingginya produksi sampah harian yang berasal dari sampah rumah tangga maupun sampah dari residu pariwisata turut memperparah tumpukan sampah yang muncul di titik-titik kota. Jika mengacu ke rata-rata volume sampah harian yang dirilis oleh Humas Pemda DIY, per tahun 2023, DIY memproduksi sekitar 1232 ton per hari. Sementara kota Yogyakarta, menurut Pemerintah Kota, menyumbang sekitar 200 ton sampah per hari.



Aksi protes warga terus bermunculan, terakhir selama tahun 2023 hingga 2024 kembali muncul protes dengan mengusung #JogjaDaruratSampah. Protes tersebut imbas dari ditutupnya TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir. Dampaknya, sampah-sampah yang ada di kota Yogyakarta tidak terangkut dan menyisakan tumpukan sekaligus bau yang menyengat. Situasi tersebut tidak dapat diantisipasi, mengingat pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, baik dari produsen (masyarakat, industri pariwisata) maupun dari pengelola TPST, belum dipilah berdasarkan jenis sampah. Sehingga, upaya yang seringkali dilakukan ialah pemusnahan melalui mesin Incinerator. Analisis Lengkap dapat diakses di website IDEA.



ANALISIS ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN RESPONSIF GENDER DI DIY

Pada tahun 2022, berinisiatif untuk mendokumentasikan hasil analisis kebijakan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan responsif gender di Provinsi DIY, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Buku ini disusun untuk memotret kebijakan anggaran pro poor dan pro gender di provinsi DIY dan seluruh kabupaten/kota di DIY. Selain itu, hasil pendokumentasian analisis ini juga sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran pemerintah provinsi DIY dan seluruh kabupaten/kota, khususnya dalam penganggaran program pro poor dan pro gender. Secara khusus, buku ini belum diterbitkan, namun sebagai rekomendasi kebijakan, hasil analisis dalam buku ini sudah disampaikan ke pemangku kepentingan di level provinsi dan kab/kota di DIY.

"Kebijakan pembangunan di Indonesia secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, negara wajib menanggulangi kemiskinan yang telah mengikis kesejahteraan rakyatnya. Ada tiga isu yang saling berkelindan yaitu kemiskinan, perempuan dan anggaran pembangunan. Ketiga isu ini melibatkan isu gender yaitu suatu konstruksi sosial yang mengatur bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial budaya.

Aspek gender menjadi aspek penting dalam diskusi penanggulangan kemiskinan karena konstruksi sosial tentang gender ini telah menempatkan perempuan dalam posisi marginal. Hal ini mengakibatkan perempuan dan laki-laki mengalami kemiskinan yang berbeda. Data PBB menyebutkan bahwa dari 1,3 milyar penduduk dunia yang termasuk kategori miskin absolut, 70%-nya adalah perempuan. Ketimpangan gender memperparah kemiskinan khususnya perempuan dan sebaliknya kemiskinan berkontribusi mempertajam ketimpangan gender.

emiskinan merupakan permasalahan multidimensional, oleh karenanya untuk mengatasi masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai aspek termasuk diantaranya aspek gender. Dalam konteks anggaran pembangunan maka penyusunannya harus berperspektif gender, tak terkecuali anggaran penanggulangan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang mencantumkan bahwa perempuan dalam perbandingan relatif dengan laki-laki, memiliki kendala lebih besar dalam mengakses hak dasar. Hal ini disebabkan, pertama karena kemiskinan mereka, kedua karena konstruksi sosial yang memarginalkan perempuan. Oleh karenanya, muncul regulasi berupa Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Inpres ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan mengurangi ketimpangan gender".

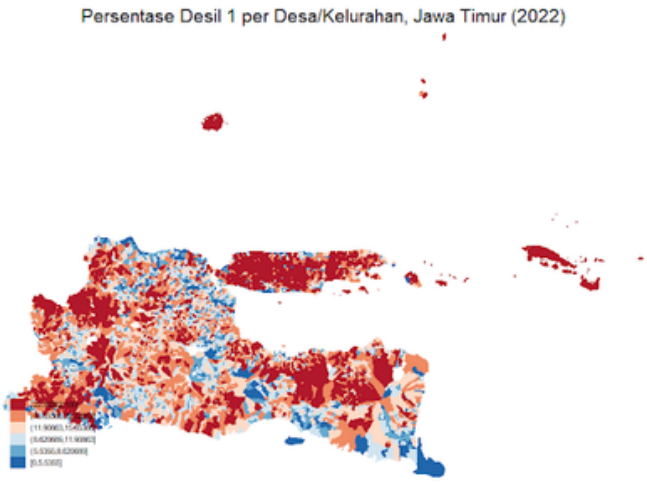
ANALISIS DATA SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

IDEA bersama dengan tim program asistensi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jatim melakukan analisis data sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem dan policy brief untuk rekomendasi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Timur. Analisis ini penting untuk memastikan kualitas data sasaran.

Gambaran kondisi kemiskinan saat ini penting untuk digunakan sebagai bahan inputan; untuk mengetahui capaian tahun ini relatif terhadap tahun sebelumnya, juga untuk mengetahui posisi relatif terhadap daerah lainnya. Gambaran saat ini juga penting untuk digunakan untuk menentukan prioritas dan sasaran, sehingga sumberdaya dapat dialokasi secara efisien kepada yang membutuhkan.

Lingkup dari laporan ini adalah mendokumentasikan hasil dan temuan dari kegiatan analisis data kemiskinan di Jawa Timur. Secara spesifik, apa yang dilakukan dalam kerangka kerja tersebut adalah:

- Menganalisis data P3KE, dengan fokus pada karakteristik kelompok Desil 1;
- Mengidentifikasi dan menganalisis potential inclusion error berdasarkan data P3KE. Banyak program yang ditujukan pada keluarga miskin/ rentan miskin, namun kenyataannya ada yang diterima juga oleh keluarga di desil-desil atas (3 dan 4+).
- Mengidentifikasi dan menganalisis exclusion error berdasarkan data P3KE. Exclusion error pada laporan ini merujuk pada kondisi dimana keluarga desil 1, yang seharusnya menjadi target sasaran program kemiskinan, namun tercatat tidak menerima (0, nol) program pada data P3KE.
- Mengagregasi data P3KE pada level desa dan memadankannya dengan berbagai data level desa, seperti: Potensi Desa dan IDM. Output dari tahap ini adalah mengetahui karakteristik lokal dimana masyarakat tinggal, sehingga dapat dianalisis kemungkinan pengaruh karakteristik lokal wilayah pada kondisi kemiskinan masyarakat
- Mengidentifikasi dan menganalisis data secara kewilayahan (spatial) untuk mengidentifikasi kantong-kantong (clusters) kemiskinan.



Ket: Agregasi data P3KE pada level desa. Persentase rata-rata Desil 1 di tiap desa adalah 14,5% dan desa-desa dengan rata-rata Desil 1 lebih besar dari 22,5% diplot berwarna merah pada peta.

ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN KEISTIMEWAAN UNTUK URUSAN KEBUDAYAAN

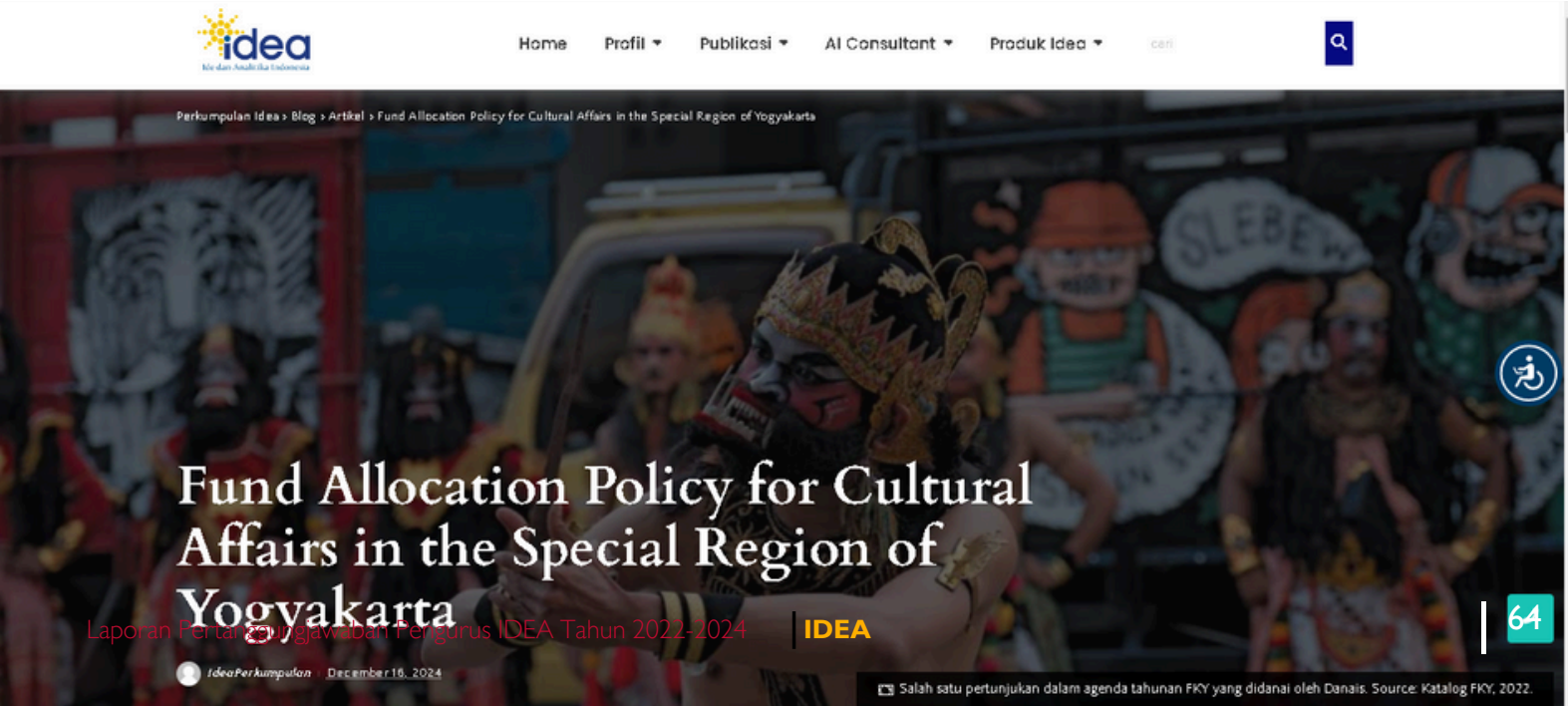
Provinsi DIY memperoleh status otonomi khusus melalui UU Nomor 13 Tahun 2012, yang menetapkannya sebagai daerah istimewa. Salah satu dampak dari otonomi khusus ini adalah adanya alokasi dana keistimewaan. Dana keistimewaan, yang bersumber dari APBN, dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan istimewa dan menjadi bagian dari dana transfer ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam implementasinya, dana tersebut dibagi berdasarkan beberapa urusan keistimewaan. Urusan-urusan yang termasuk dalam kewenangan istimewa meliputi pengisian jabatan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Setiap tahun, sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2013, danais DIY mengalami peningkatan secara konsisten, termasuk dalam 3 tahun terakhir. Pada tiga tahun ini, jumlah transfer Dana Keistimewaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh kinerja yang baik dari segi fisik maupun keuangan.



Pada urusan kebudayaan, dari sisi jumlah, menerima alokasi Danais terbesar selama periode 2022–2024. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, alokasinya melebihi angka 1 triliun rupiah. Dari sisi, alokasi urusan ini consistently berada di atas 70%, dan pada tahun 2023 hampir mencapai 80%.





Salah satu pertunjukan dalam agenda tahunan FKY yang didanai oleh Danais. Source: Katalog FKY, 2022.

MINI RISET PRAKTIK POLITIK UANG DI INDONESIA

Politik uang merupakan sebuah praktik politik yang merusak integritas demokrasi. Meskipun terdapat dalam banyak sistem politik, hal ini terutama terlihat dalam politik Indonesia, di semua tingkatan, menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Maret 2014. 78,2 persen pemilih menganggap politik uang adalah hal yang lazim, "umum" (Politik Uang di Indonesia, Bab 20). ilegal, hal ini tentu memprihatinkan.

Bentuk politik uang yang paling terkenal di Indonesia adalah pembelian suara, dimana para kandidat menyuap pemilih secara langsung sebelum pemilu. Mengingat bahwa pembelian suara adalah tindakan ilegal, maka sangat sulit untuk mengumpulkan data mengenai metode-metode tertentu dalam kasus pembelian suara. Namun, kasus jual beli suara yang paling banyak terjadi ialah pada hari-hari terakhir menjelang pemilu.

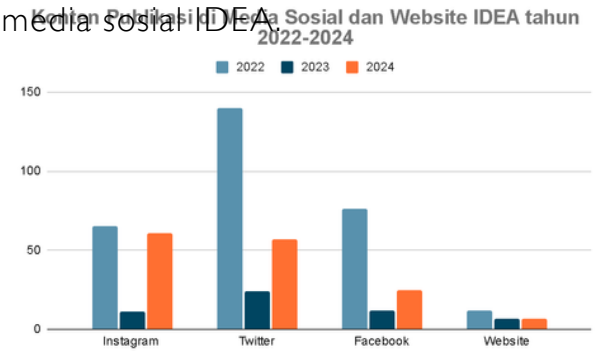
Untuk pemilu di Indonesia, terdapat jangka waktu tiga hari antara berakhirnya masa kampanye dan hari pemilu, yang dikenal sebagai waktu yang disebut dengan istilah "Masa Tenang". Periode ini awalnya bertujuan untuk menjaga pemilu yang demokratis dan adil, namun ironisnya, periode ini justru merupakan periode yang paling dieksploitasi untuk terjadinya transaksi jual beli suara antara kandidat/tim kampanye dan pemilih berupa amplop berupa uang tunai, kebutuhan sehari-hari, dan bahkan layanan serta manfaat ekonomi lainnya, yang pada akhirnya diharapkan agar suara penerima manfaat akan diberikan kepada para kandidat sebagai imbalannya. Analisis lengkap dapat diakses di website IDEA.



IDEA DALAM MEDIA

Dalam kurun waktu periode tahun 2022-2024, IDEA dalam media fokus mendiseminasikan kerja-kerja IDEA ke khalayak luas, terutama media sosial dan website. Selain itu, juga membangun kolaborasi dengan media mainstream agar memuat hasil analisis, temuan maupun riset IDEA, sehingga perspektif-perspektif IDEA dapat dibaca publik secara luas dan meningkatkan eksposur IDEA. Jenis-jenis konten yang dipublikasi antara lain meliputi kegiatan program, hasil analisis dan konten kampanye tentang isu demokrasi dan akuntabilitas.

Publikasi dilakukan untuk memberikan edukasi, penyebaran konten pengetahuan, serta mempengaruhi persepsi public tentang isu-isu strategis IDEA. Selain itu, publikasi juga dilakukan untuk mainstreaming dan branding IDEA ke pihak-pihak terkait, seperti kelompok warga, pemerintah, jurnalis serta donor-donor yang mengikuti media sosial IDEA.



Penulisan praktik baik merupakan kegiatan yang dibuat untuk mengelola dan mendokumentasikan capaian-capaian penting kegiatan dalam bentuk tulisan.

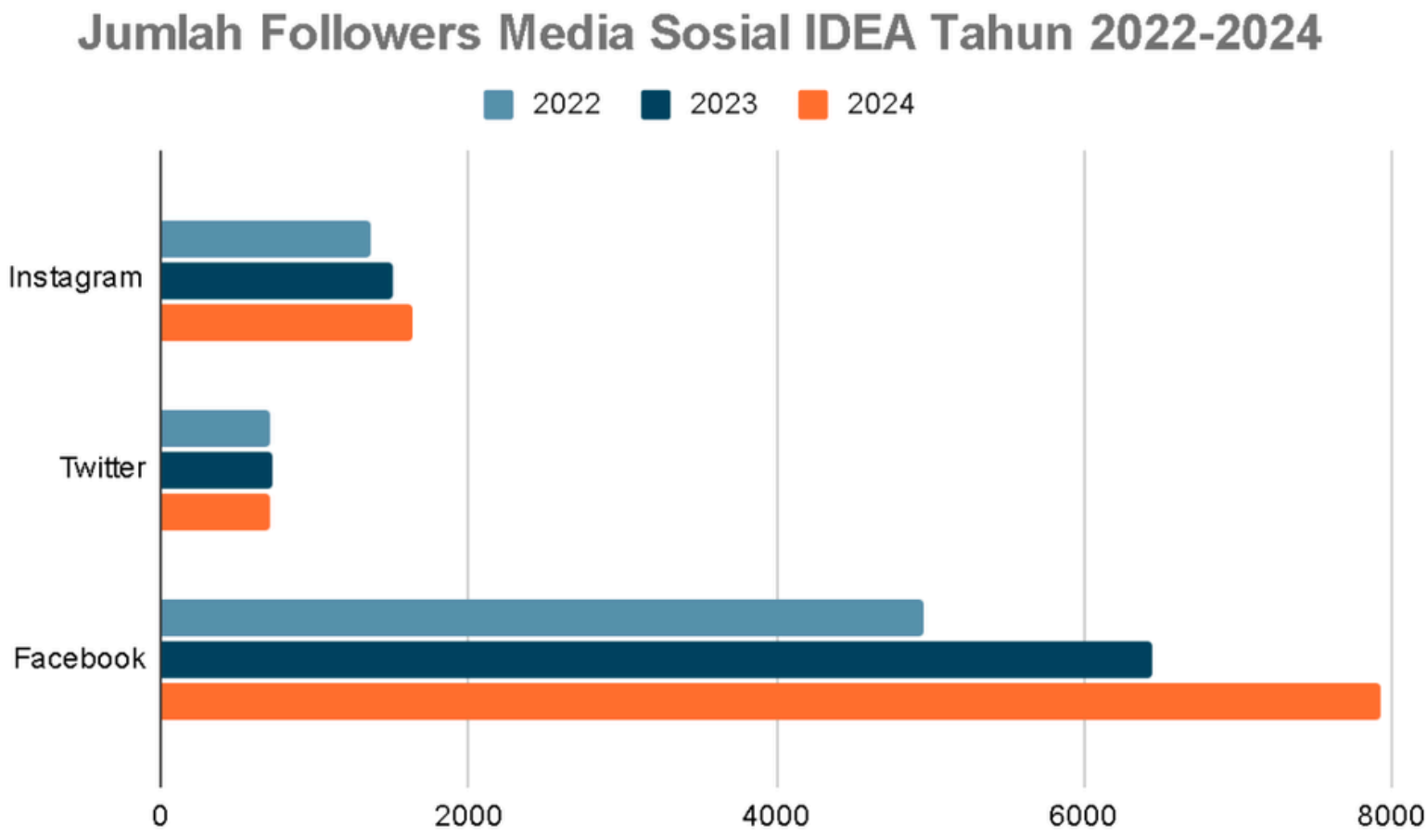
Kegiatan ini bertujuan mengkampanyekan ke publik tentang dampak baik program yang dijalankan IDEA di lokasi pelaksanaan program, baik ke warga maupun pemerintah. Perkumpulan IDEA, melalui program Bantuan Teknis Solusi Lokal Transparansi Dana Desa dan Kelurahan MADANI, telah mendokumentasikan praktik baik dari 7 daerah yaitu Kota Surakarta, Kota Madiun, Kabupaten Serang, Kabupaten Sumenep, Sambas, Luwu Utara dan Kabupaten Sumedang.

Topik-topik praktik baik tersebut adalah:

- Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Pembangunan Di Kota Madiun Yang Inklusif
- Kolaborasi Pemerintah Dengan Forpemma Dalam Memperkuat Kelurahan Mandiri Berkelanjutan
- Mengubah "Noice" Menjadi "Voice": Geliat Kelompok Pekka Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Kelurahan Mojosongo
- Jasa Dan Usaha Yang Diidentifikasi Secara Partisipatif Berbasis Masyarakat
- Mengelola Bumdesa Yang Berbasis Masyarakat
- Komitmen Pemerintah Desa Pincara Mendorong Pelibatan Kelompok Rentan Dalam Proses Pembangunan Desa Yang Inklusi
- Musyawarah Khusus Perempuan Untuk Anggaran Desa Yang Inklusif
- Kadin Sebagai Motor Penggerak Menuju Dana Desa Yang Inklusif

- Jaring Aspirasi Kader Pintar Untuk Perencanaan Desa Yang Lebih Partisipatif
- Menembus Batas Dominasi Laki-Laki Di Organisasi Kader Pintar Desa Kadakajaya
- Replikasi Madrasah Anggaran Kader Pintar Untuk Desa Ciherang Menuju Perempuan Lebih Berdaya
- Kerjasama Kolaborasi Menciptakan Kepercayaan Pemda Terhadap Oms
- Mawar Desa Berkontribusi Dalam Membangun Domas Yang Sejahtera
- Kolaborasi Adalah Kunci

Dalam tiga tahun terakhir, media sosial idea mengalami trend perkembangan yang baik. Dari sisi followers, facebook masih menjadi platform dengan followers terbanyak diikuti instagram dan twitter. Dari sisi perkembangan followers, instagram IDEA menunjukkan trend perkembangan yang meningkat dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Followers di media sosial idea, secara keseluruhan merupakan followers Non Boot yang bersifat organik. Hal tersebut dapat dilihat dalam statistik followers berikut ini.



BAB IV
TATA KELOLA KELEMBAGAAN IDEA



AGENDA PRIORITAS 7

PENGUATAN TATA KELOLA LEMBAGA SEBAGAI PERKUMPULAN YANG SOLID DAN BERKELANJUTAN

PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Selama kurun waktu Tahun 2022-2024, pegiat IDEA terlibat dalam beberapa kegiatan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk pelatihan, coaching clinic, maupun exercise simulasi bencana. Secara organisasi, IDEA juga telah memiliki panduan pengelolaan SDM yang dapat digunakan sebagai landasan dalam memetakan kebutuhan SDM untuk keberlanjutan organisasi. Berikut ini adalah agenda penguatan kapasitas yang diikuti oleh staf IDEA pada Tahun 2022-2024:

WAKTU	KEGIATAN	PENYELENGGARA	STAF YANG TERLIBAT
21-24 Maret 2022	Pelatihan Pengelolaan dan Strategi Keuangan Organisasi Non Laba Seri-IV Perpajakan Bagi Organisasi Non Laba	PWYP	Sari Biwantari
22 September 2022	Coaching Clinic Penyajian Laporan Keuangan ISAK 35 menggunakan Smart Excel	PWYP	Sari Biwantari, Nani Wudjiyanti
14-15 September 2023	Table Top Exercise Training	Oxfam	Tenti (JMK)
15 November 2022	Manajemen Aset Tetap	PWYP	Sari Biwantari, Andi Apriyanto
Desember 2023	Pelatihan scoping study	PWYP	Hedar dan Tenti
27-Jan-2023	Pelatihan keuangan Seri ke 12-14 tentang Persiapan Menghadapi Audit Organisasi Nonlaba Membangun Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan & Membangun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang-Jasa di Organisasi Nonlaba.	PWYP	Andi dan Sari
Jum'at, 4-Agustus-2023	Pelatihan True Cost Budget dalam Penyusunan Proposal Budget	INFID	Nur Khofifah
28 Oktober-3 November 2024	Pengembangan Kapasitas Kemanusiaan dan Simulasi Bencana -	OXFAM	Tenti Novari Kurniawati (JMK)
6-8 November 2024	Lokakarya dan Pelatihan Safeguarding dan Anti-Korupsi	OXFAM	Ahmad Hedar (JMK)

PENGELOLAAN PROGRAM MAGANG (*INTERNSHIP PROGRAM*)

Internship program adalah upaya pengembangan sumberdaya manusia untuk mencetak kader-kader pejuang perubahan sosial maupun ruang belajar bagi orang muda yang ingin memperkuat kapasitasnya dalam advokasi kebijakan. Melalui program ini, IDEA juga mendapat eksposure di beberapa universitas, baik di dalam dan luar negeri. Dari sisi internal, Internship program membantu kerja-kerja IDEA, terutama untuk analisis data dan produksi konten pengetahuan.

Pada periode tahun 2022-2024, IDEA mengelola program magang dalam negeri melalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Melalui program MBKM, IDEA mendapat mahasiswa magang dari Universitas Amikom dengan jumlah pemagang dua orang. Selama periode magang pada tahun 2023, kedua mahasiswa tersebut mengerjakan video profil terkait hak kewajiban warga negara dan pendampingan kelompok disabilitas di pinilih, Sedayu Bantul untuk pemanfaatan marketplace dalam menjalankan usaha disabilitas.

Program magang luar negeri bekerjasama dengan Program Dragon Bridge Year. Selama tahun 2022 hingga 2024, IDEA dipercaya mendampingi 3 mahasiswa Magang dari Universitas Princeton, Amerika Serikat.

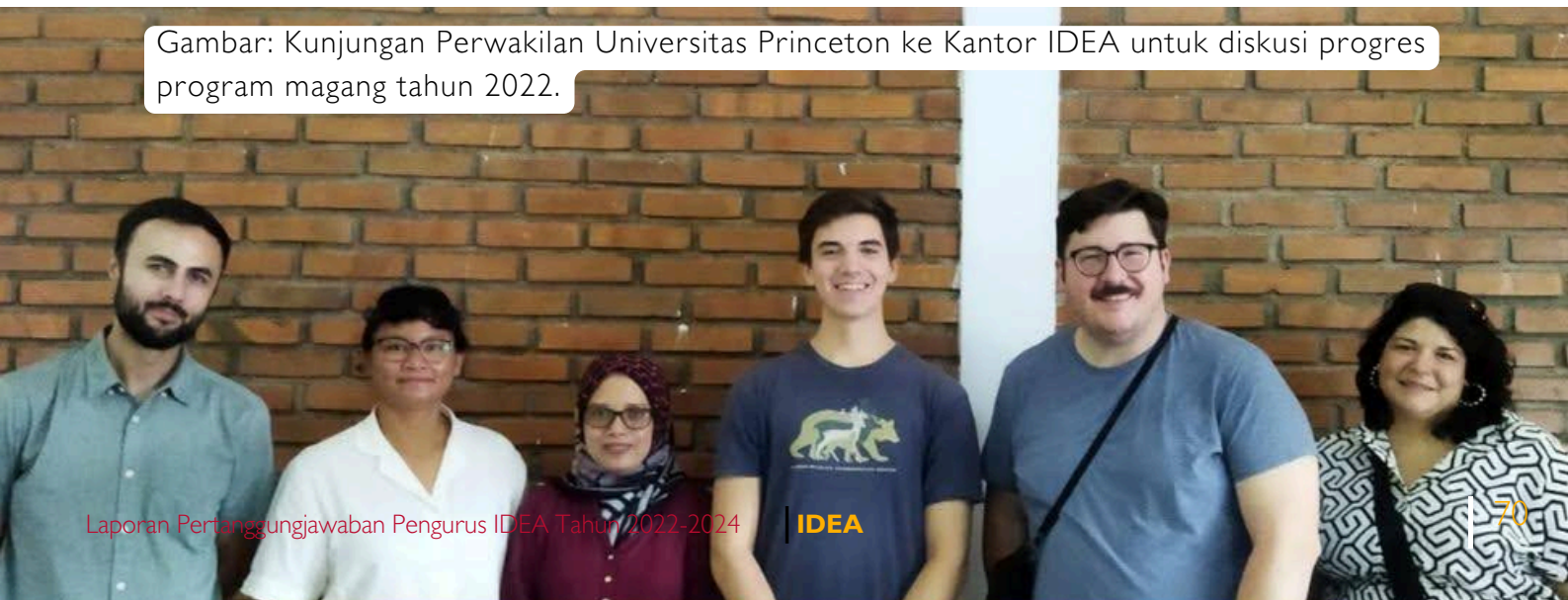


Gambar: Diskusi program magang antara IDEA dengan mahasiswa dari Princeton University di kantor IDEA tahun 2022.

- Tahun 2022-2023 mahasiswa yang magang ialah Katriona. Ia Mahasiswa asal Miami, Amerika Serikat. Selama Magang ia tertarik untuk mempelajari isu lingkungan dan keadilan gender. Ada beberapa produk magang yang ia hasilkan, diantaranya ialah flyer dan artikel tentang keadilan gender dalam pembangunan di Indonesia.
- Tahun 2023-2024, mahasiswa magang ialah Remzy Abacy. Remzy memiliki minat untuk belajar tentang analisis kebijakan dan anggaran, serta isu lingkungan yang berkelanjutan. Dia melakukan pengumpulan data dan menganalisis anggaran industri ekstraktif di Kabupaten Morowali. Tema yang ia ambil ialah Nickel Mining and Processing in Indonesia with a Budget Analysis of Morowali Regency.
- Tahun 2024-2025, mahasiswa Princeton ketiga yang mengikuti program magang di IDEA ialah Leila. Ia merupakan warga Lebanon yang tinggal di Cohasset, Massachusetts, Amerika Serikat. Saat ini ia masih aktif mengikuti magang, ia memiliki minat untuk mempelajari kajian pemilu dan penanggulangan kemiskinan. Hingga quarter pertama, Leila sudah menghasilkan mini riset tentang politik uang dalam pemilu di Indonesia. Mini Riset ini ia kerjakan selama masa tahapan pemilu dan pilkada di Indonesia. Hasil dari tulisan Leila dapat diakses https://perkumpulanidea.org/2024/11/25/money-politics-in-elections-in-indonesia/ . Sementara pada quarter kedua, Leila tertarik untuk membuat kajian tentang penanggulangan kemiskinan di DIY melalui pendekatan anggaran.

Selain itu, program magang juga dibuka secara tentatif berdasarkan permohonan dari mahasiswa yang memiliki kebutuhan untuk melakukan kajian cepat. Pada tahun 2023 IDEA menerima mahasiswa internasional bernama Kay S. Canales dari Institut Hak Asasi Manusia dan Perdamaian Studi (IHRP) Mahidol University (MU), Thailand, sedang mengejar gelar master gelar dalam Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi di bawah program APMA Kampus Hak Asasi Manusia Global.

Target dari praktikum atau magang tersebut antara lain merancang dan melaksanakan penelitian terapan yang relevan dengan hak asasi manusia dan isu demokratisasi di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Dari program ini, Kay menghasilkan brief dengan tema the people's account: promoting human rights through participatory budgeting.Produk lainnya dapat diakses di website IDEA.



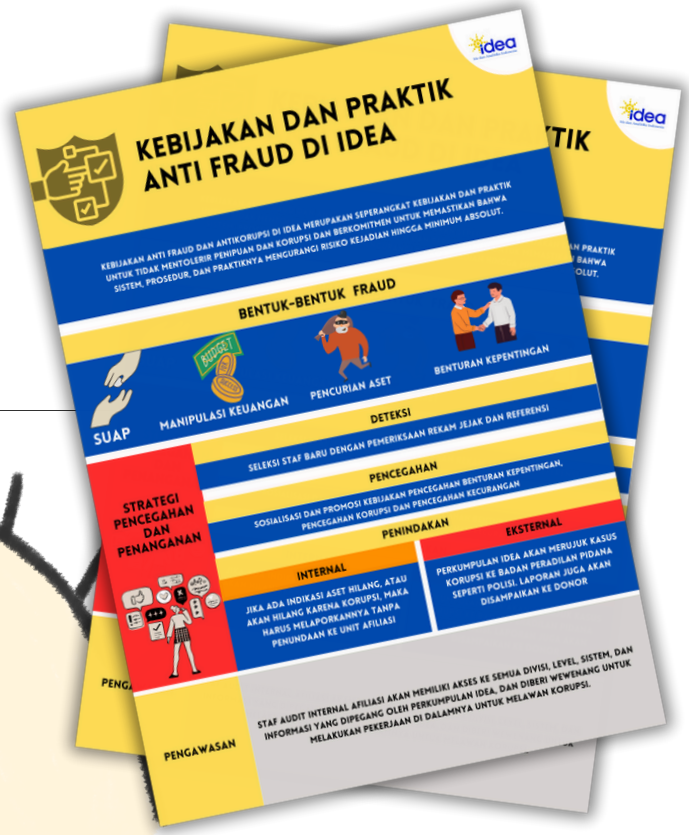
Gambar: Kunjungan Perwakilan Universitas Princeton ke Kantor IDEA untuk diskusi progres program magang tahun 2022.

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN IDEA

IDEA secara rutin setiap pergantian pengurus melakukan pembaharuan legalitas organisasi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, IDEA juga memiliki kebijakan yang mendukung tata kelola lembaga yang akuntabel dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut tersebut antara lain adalah:

- Prosedur operasi baku Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa, dan Pengelolaan Aset
- Prosedur operasi baku Konflik Kepentingan dan Anti Kecurangan (Anti Freud)
- Prosedur operasi baku Manajemen Data Informasi dan Administrasi Perkantoran
- Prosedur operasi baku Pengelolaan Pengetahuan
- Prosedur operasi baku Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Prosedur operasi baku Perlindungan Anak
- Prosedur operasi baku Perlindungan Perempuan
- Prosedur operasi baku Perlindungan Disabilitas
- Prosedur operasi baku perlindungan dan eksploitasi dan pelecehan seksual (psea:protection from sexual exploitation and abuse).

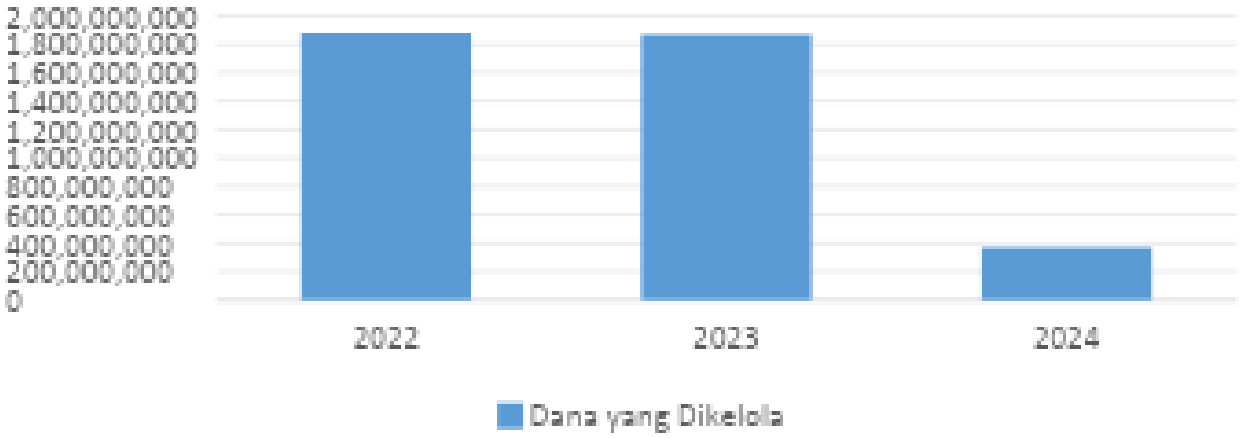
Selain itu, IDEA juga menyediakan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Staf serta Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program.





KINERJA KEUANGAN IDEA

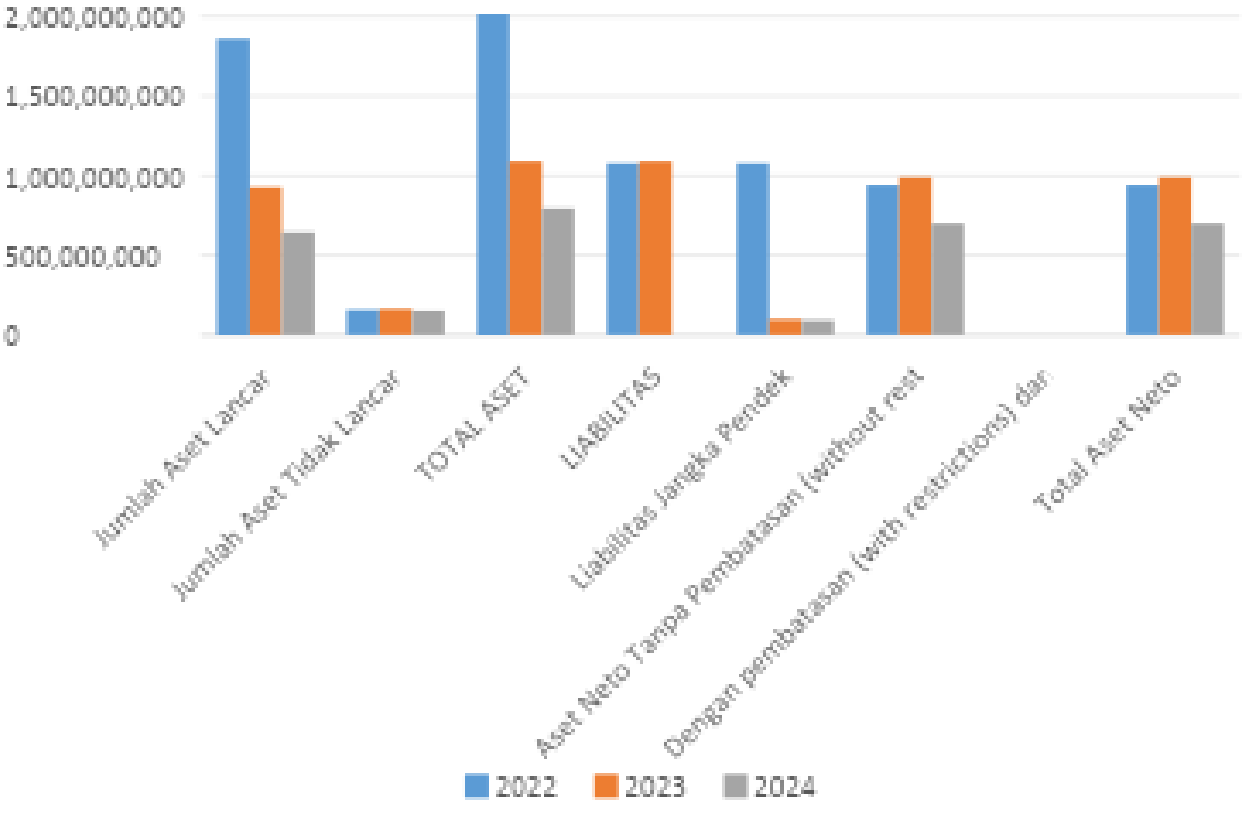
DANA PROGRAM YANG DIKELOLA IDEA 2022-2024



Dalam kurun waktu tahun 2022-2024, IDEA telah menyelesaikan laporan keuangan Tahun 2022 dan 2023 yang sudah diaudit oleh Auditor Independen KAP Drs.Henry Susanto Akt., CPA., CA., CPI. & Sugeng dengan opini wajar.

Opini wajar tersebut dalam hal semua yang material, laporan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Arus Kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN IDEA 2022-2024





JL. TUNJUNG 10, BACIRO, GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA 55225